

**SANKSI PIDANA BAGI ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sungguminasa)**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (SH)
Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Pada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

Oleh:

FIRA YUNIAR
NIM: 10300113170

**JURUSAN HUKUM PIDANA DAN KETATANEGARAAN
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fira Yuniar
NIM : 10300113170
Tempat/Tgl. Lahir : Tibona/13 Mei 1995
Jur/Prodi/Konsentrasi : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Fakultas/Program : Syari'ah dan Hukum
Alamat : Jl. Mustafa Dg. Bunga, Samata
Judul : Sanksi Pidana bagi Anak yang Melakukan Tindak Pidana
Penganiayaan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di
Pengadilan Negeri Sungguminasa)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 26 Juli 2017

Penyusun



FIRA YUNIAR
NIM: 10300113170

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Sanksi Pidana Bagi Anak yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Pengadilan Negeri Sungguminasa)”, yang disusun oleh Fira Yuniar, NIM: 10300113170, mahasiswa jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasah yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 M, bertepatan dengan 4 Dzulqa’dah 1438 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari’ah dan Hukum, Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan (dengan beberapa perbaikan).*

Makassar, 30 Juli 2017 M
7 Dzulqa’dah 1438 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam, M. Ag	(.....)
Sekretaris	: Dra. Nila Sastrawati, M. Si	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Dudung Abdullah, M. Ag	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Rahma Amir, M. Ag	(.....)
Pembimbing I	: Prof. Dr. Usman, M. Ag	(.....)
Pembimbing II	: Dr. Hj. Rahmatiah HL., M. Pd	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar



Prof. Dr. Darussalam, M. Ag
NIP: 19621016 199003 1 003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur alhamdulillah saya panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Semesta Alam yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Sanksi Pidana Anak yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sungguminasa)**” sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Junjungan Nabi Besar Muhammad saw. Beliau adalah hamba Allah swt. yang benar dalam ucapan dan perbuatannya, yang diutus kepada penghuni alam seluruhnya, sebagai pelita dan bulan purnama bagi pencari cahaya penembus kejahatan gelap gulita. Sehingga, atas dasar cinta kepada Beliau, penulis mendapatkan motivasi yang besar untuk menuntut ilmu.

Sesungguhnya, penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan sebagai wujud dari partisipasi kami dalam mengembangkan serta mengaktualisasikan ilmu yang telah kami peroleh selama menimba ilmu dibangku perkuliahan, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, dan juga masyarakat pada umumnya.

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas ini, baik

secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, perkenankan penulis menyampaikan ungkapan terima kasih, kepada yang terhormat :

1. Kedua Orang tua yang sangat saya hormati dan cintai, Bapak Ambo dan Ibunda tercinta dan tersayang Ida, yang telah memberikan kasih dan sayangnya sepanjang masa, semoga Allah swt melimpahkan Ridho dan Kasih-Nya kepada keduanya. Sebagaimana mereka telah mendidik sejak kecil, yang atas asuhannya, limpahan kasih sayangnya serta motivasi dan dorongan mereka, semoga memperoleh kekuatan material dan moril dalam merintis kerasnya kehidupan. Saudari tercinta Febi Febrianti yang selalu menjadi alasan untuk cepat menyelesaikan studi, yang selalu memberikan kebahagiaan tersendiri dalam keluarga.
2. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M. Ag selaku Rektor UIN Alauddin Makassar. Beserta seluruh Civitas Akademik atas bantuannya selama mengikuti pendidikan.
3. Bapak Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M. Ag Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar atas segala motivasi yang telah diberikan kepada mahasiswa.
4. Ibu Dra. Nila Sastrawaty, M.Si Selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan serta Ibu Dr. Kurniati., S. Ag., M. Hi selaku Sekretaris Jurusan yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan saran maupun masukan.
5. Bapak Prof. Dr. H. Usman Jafar, M. Ag dan Dr. Hj. Rahmatiah HL, M. Pd selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing

sampai selesainya penyusunan skripsi ini. Serta Bapak Dr. Dudung Abdullah, M. Ag dan Ibu Dr. Rahma Amir, M. Ag selaku penguji.

6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar yang telah mencurahkan tenaga, pikiran serta waktunya untuk membimbing dan memberikan berbagai ilmu pengetahuan kepada mahasiswa.
7. Bapak Zaid Buri Prahastyo dan Ibu Santi Guricci yang telah menjadi orang tua ke-2 yang memberikan kasih sayang dan perhatiannya serta banyak berjasa selama saya kuliah. Selain itu Ahmad Maulana dan Nurwahuni yang selalu setia menemani dan menjaga serta memberikan dukungan dan motivasinya.
8. Sahabat sekaligus saudara Irmayanti, A. Sharfiah Mustari, Nurfadillah Ridwan, Hasmira H, Sri Sutra Santi, Intan Syamsuddin dan Nurwahyuni yang telah setia berbagi suka dan duka hingga berjuang menyelesaikan tugas akhir bersama-sama.
9. Teman-teman sejurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, khususnya HPK 7/8 yang telah membantu selama perkuliahan sampai sekarang ini, yang namanya tak sempat saya sebutkan satu demi satu.
10. Sahabat, teman sekaligus keluarga KKN Angk. 55 Desa paranglompoa yang telah memberikan kesan dan warna tersendiri selama berKKN. Bapak H. Iruk Sugiarto selaku Kepala Desa Paranglompoa yang telah menjaga dan menerima layaknya anak sendiri, memberikan banyak motivasi dan dukungannya serta meluangkan waktunya untuk sekedar berbagi.
11. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu.

Penulis sebagai manusia biasa yang takkan pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis sangat mengharap kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, teriring do'a kepada Allah swt, penulis berharap semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya yang tentu dengan izin dan ridho-Nya. Aamiin

Samata-Gowa, 22 Juli 2017

Penyusun,

Fira Yuniar

Nim: 10300113170



DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL/ILUSTRASI	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan asalah	5
C. Deskripsi fokus dan fokus penelitian	5
D. Kajian Pustaka	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
BAB II TINJAUAN TEORETIS	12
A. Pengertian Tindak Pidana Anak dan Penganiayaan	12
B. Maksud dan Tujuan Sistem Penerapan Sanksi Pidana Anak	18
C. Dasar hukum Penganiayaan dan Perlindungan Anak	21
D. Hak-hak Anak atas Perlindungan Hukumnya di Indonesia	25
E. Penangkapan, Penahanan, dan Jenis Sanksi Terhadap Anak	28
F. Pertimbangan Pidana dan Perlakuan Anak dalam Menerapkan Sanksi Pidana	38

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	44
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	44
B. Pendekatan Penelitian	44
C. Sumber data	45
D. Metode Pengumpulan Data	46
E. Instrumen Pengumpulan data	48
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	48
G. Penguji keabsahan data	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Gambar Umum Lokasi Penelitian	51
B. Konsep Pemidanaan dalam hukum Islam terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan.....	55
C. Persepsi Hakim Mengenai Sanksi Pidana bagi Anak yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan.....	57
D. Upaya Hukum Agar Anak Tidak Lagi Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan	63
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Implikasi penelitian	68
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL/ILUSTRASI

Tabel I	Tentang Informan.....	45
Tabel II	Jumlah Kasus Anak yang Melakukan Penganiayaan.....	59
Tabel III	Pasal yang Dikenakan Pada Anak yang Melakukan Penganiayaan Tahun 2015.....	59
Tabel IV	Pasal yang Dikenakan Pada Anak yang Melakukan Penganiayaan Tahun 2016.....	61
Tabel V	Putusan Akhir Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan...	62



ABSTRAK

Nama : Fira Yuniar
Nim : 10300113170
Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
**Judul : Sanksi Pidana bagi Anak yang Melakukan Tindak Pidana
Penganiayaan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di
Pengadilan Negeri Sungguminasa)**

Skripsi ini membahas tentang sanksi pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan dalam perspektif hukum Islam. Pembahasannya bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep pembedaan terhadap anak dan persepsi hakim mengenai sanksi pidana anak serta upaya hukumnya agar anak tidak lagi melakukan tindak pidana penganiayaan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif (*field research*) dengan lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Sungguminasa Kab. Gowa. Jenis data diperoleh dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari riset di Pengadilan Negeri Sungguminasa dan data sekundernya dikumpulkan melalui *Library research*. Teknik pengumpulan data menggunakan studi lapangan dan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif.

Hasil analisis menunjukkan bahwa sanksi pidana yang diberikan kepada anak menurut hukum Islam disesuaikan dengan usia dan kemampuan bertanggung jawabnya. Apabila ia telah memenuhi syarat untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka ia akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku dalam syariat Islam. Dalam sistem peradilan pidana anak, sebelum di sidangkan jika perkaranya adalah perkara yang ancaman pidananya 7 tahun kebawah, maka dapat dilakukan diversi. Diversi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan pelaku, penyelesaiannya di luar proses pradilan, menghindari anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab terhadap anak. Jika upaya diversi berhasil, maka tidak ada lagi lanjutan. Namun jika tidak berhasil, maka anak dihadapkan dengan hukum atau di sidang. Akan tetapi upaya diversi masih dapat dilakukan pada tahap penyidikan maupun penuntutan. Apabila sama sekali tidak dapat diupayakan diversi, maka disinilah peranan hakim untuk bagaimana memutuskan dengan semestinya sesuai dengan perkara yang dihadapi anak.

Maka implikasinya, perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak hendaknya mendapatkan perhatian yang lebih baik, baik itu dari keluarga khususnya orang tua, pemerintah dan aparat hukum. Hal tersebut akan dapat memberikan efek tersendiri bagi anak.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk Allah swt. selain berhubungan dengan Tuhannya (*habl min al-Allah*) juga berhubungan dengan manusia (*habl min al-nass*). Maka sadar atau tidak sadar akan dipengaruhi oleh aturan-aturan atau norma-norma hidup bersama yang mengekang hawa nafsu dari masing-masing individu sebagai batasan atas segala perilaku masyarakat.

Hukum selalu melekat pada kehidupan manusia sebagai individu ataupun masyarakat. Dengan peranannya, hukum berfungsi menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul didalam kehidupan sosial.¹ Hukum dijadikan alat untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih maju. Sebagai penentuan alokasi wewenang secara terperinci, siapa yang boleh melakukan pelaksanaan (penegak) hukum, siapa yang harus menaatinya, siapa yang memilih sanksi yang tepat dan adil, seperti konsep hukum konstitusi negara.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.²

¹Erfan Helmi Juni, *Filsafat Hukum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 8.

²Achmad Fauzan, *Perundang-undangan Lengkap Tentang Peradilan Umum, Peradilan Khusus, dan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 95.

Di Indonesia telah dibuat peraturan-peraturan yang pada dasarnya sangat menjunjung tinggi dan memperhatikan hak-hak dari anak yaitu diratifikasinya Konvensi Hak Anak (KHA) dengan keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Peraturan perundangan lain yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia antara lain, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Secara substansinya Undang-Undang tersebut mengatur hak-hak anak yang berupa, hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, berpikir, bermain, berkreasi, beristirahat, bergaul dan hak jaminan sosial.

Undang-undang No. 11 tahun 2012 pada Penjelasannya Pasal 2 huruf a, menyatakan bahwa perlindungan anak meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis, yang secara jelas dapat dipahami dalam uraian tentang konsep perlindungan hukum bagi anak. Berdasarkan uraian di atas maka pengertian perlindungan hukum adalah hal perbuatan melindungi anak yang lemah dan belum kuat secara fisik, mental, sosial, ekonomi dan politik, untuk memperoleh keadilan sosial yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel melainkan juga prediktif dan antisipatif berdasarkan hukum yang berlaku.³

Meskipun demikian, namun untuk anak sendiri proses penerapan sanksi pidananya berbeda karena berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis* yang artinya bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum

³Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak* (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016), h. 7.

yang umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak merupakan titipan Allah yang harus dijaga dan dididik sebaik mungkin sehingga menjadi anak yang berguna bagi keluarga dan agamanya.

Penegakan hukum terhadap anak ternyata menimbulkan masalah, baik dari sudut hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam. Dapat disimak Pasal 5 UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dalam hal ini anak belum mencapai umur 8 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan secara khusus oleh penyidik.⁴

Apa yang dapat kita petik dari pasal tersebut adalah bahwa anak yang belum berumur 8 tahun tetapi melakukan suatu tindakan pidana tertentu, maka ada 2 alternatif tindakan yang dapat diberikan kepada anak tersebut. *Pertama*, diserahkan kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya, jika anak tersebut masih dapat dibina ; *Kedua*, diserahkan kepada Departemen Sosial jika anak tersebut tidak dapat dibina oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya.⁵

Persoalan ini perlu mendapatkan perhatian yang serius mengingat berbagai keterbatasan dan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan. Apalagi sering terdapat kecenderungan dalam produk kebijakan legislasi bahwa hukum pidana selalu digunakan untuk menakut-nakuti atau mengamankan bermacam-macam kejahatan yang mungkin timbul di berbagai bidang. Fenomena

⁴Undang-Undang Peradilan Anak (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 4.

⁵Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), h. 27.

semacam ini memberi kesan seolah-olah dirasakan kurang sempurna atau hambar bila suatu produk perundang-undangan tidak ada ketentuan pidananya.⁶

Usaha untuk mengurangi atau melenyapkan gambaran pada masyarakat, bahwa sistem peradilan pidana tidak atau kurang berfungsi yaitu, dengan meningkatkan efektivitas setiap dan masing-masing subsistem serta bekerja lebih terpadu untuk memperoleh efisiensi bersama (keseluruhan sistem) yang lebih tinggi.⁷

Dalam hukum Islam, orang tua wajib mendidik anak-anaknya dengan baik. Jika anak menjadi nakal, berarti orang tua tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka orang tua lah yang menanggung akibatnya, yakni diberi sanksi (hukuman) karena kelalaiannya. Dengan demikian, permasalahan penegakan hukum terhadap kejahatan anak cukup urgen untuk diteliti secara hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

Jadi perlakuan hukum pada anak sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang serius karena bagaimanapun anak adalah masa depan suatu bangsa. Oleh karena itu, dalam menerapkan sanksi pidana bagi anak, jaksa sebagai penuntut umum dapat menerapkan sanksi sesuai dengan dasar hukum perundang-undangan untuk mengembalikan dan mengarahkan anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi kehidupan bangsa dan agamanya.

Berdasarkan uraian tersebut maka dalam tulisan ini ditetapkan untuk membahas mengenai permasalahan tentang sanksi pidana bagi anak yang melakukan

⁶Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), h. 5.

⁷Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 155.

tindak pidana. Oleh karena itu penulis mengangkat topik dengan judul: “Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sungguminasa)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar Belakang masalah tersebut diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah Bagaimana Sanksi pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan perspektif hukum Islam” dengan sub-sub masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep pembedaan dalam hukum Islam terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan ?
2. Bagaimana persepsi hakim terhadap sanksi pidana anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan ?
3. Bagaimana upaya hukum agar anak tidak lagi melakukan tindak pidana penganiayaan ?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Agar permasalahan yang dikaji dalam penulisan skripsi ini tidak terlalu luas dan menyimpang dari rumusan permasalahan yang ditentukan, maka penelitian perlu dibatasi permasalahannya sesuai dengan judul skripsi ini yaitu Sanksi Pidana bagi Anak yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan dalam Perspektif Hukum Islam.

1. Fokus Penelitian

- a. Sanksi Pidana
- b. Anak
- c. Tindak Pidana Penganiayaan
- d. Hukum Islam

2. Deskripsi Fokus Penelitian

a. Sanksi pidana

Sanksi pidana atau pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya.⁸

b. Anak

Anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah manusia yang masih kecil, usia yang masih rendah.⁹ Dalam UU Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

c. Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan yang dimaksud adalah penganiayaan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si petindak.¹⁰

d. Hukum Islam

Hukum Islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-qur'an (hukum syara').¹¹

⁸Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012), h. 156.

⁹Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 30.

¹⁰Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), h. 12.

¹¹Sudarsono, *Kamus Hukum* (Cet. V; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), h. 169.

Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
Sanksi pidana	Sanksi pidana atau pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya.
Anak	Anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah manusia yang masih kecil, usia yang masih rendah. Dalam UU Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
Tindak Pidana Penganiayaan	Tindak pidana penganiayaan yang dimaksud adalah penganiayaan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si petindak.

Hukum Islam	Hukum Islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-qur'an (hukum syara')
-------------	---

D. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa literatur yang masih berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud di antaranya adalah sebagai berikut:

Erfan Helmi Juni, S.H., M.Hum., dalam bukunya *Filsafat Hukum*. Adapun isi bukunya mengenai sejarah hukum di Indonesia dan lembaga-lembaga penegakan hukum yang ada di Indonesia.¹² Namun, dalam buku ini tidak membahas secara detail sistem penerapan sanksi bagi anak yang melakukan tindak pidana.

Wagiati Soetodjo, SH.,M.S., dalam bukunya *Hukum Pidana Anak*. Isi bukunya membahas mengenai anak dan perlindungan hukumnya. Berbicara masalah anak sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang.¹³ Dalam buku ini tidak menjelaskan secara khusus mengenai sanksi pidana anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan dalam perspektif hukum Islam.

Mahrus Ali, SH., MH., dalam bukunya *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Adapun isi bukunya mengenai pengetahuan dan teori dasar hukum pidana serta membicarakan

¹²Erfan Helmi Juni, *Filsafat Hukum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 10.

¹³Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), h. 5.

terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan seseorang.¹⁴ Tetapi, dalam buku ini tidak menjelaskan secara khusus mengenai pertanggungjawaban pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana.

Sholehuddin, SH., MH., dalam bukunya *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*. Isi dari buku ini adalah membahas ide dasar sanksi pidana dan tindakan serta implementasinya dalam kebijakan (produk) legislasi.¹⁵ Buku ini tidak menjelaskan sanksi pidana pada anak yang melakukan penganiayaan.

Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S. buku cetakan I yaitu *Hukum Perlindungan Anak* yang menguraikan masalah perlindungan hukum bagi anak yang tidak hanya terbatas pada perlindungan hukum dan pada proses peradilan namun mencakup *spectrum* yang lebih luas.¹⁶ Dalam buku ini tidak membahas secara khusus mengenai sanksi pidana anak yang melakukan penganiayaan dalam perspektif hukum Islam.

Dari beberapa literature diatas, tidak ada satu pun yang membahas secara spesifik mengenai permasalahan sanksi pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan dalam perspektif hukum Islam. Walaupun ada yang membahas mengenai anak dalam buku, namun tidak menjelaskan secara khusus hanya gambaran umum mengenai anak.

¹⁴Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 156.

¹⁵Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), h. 13.

¹⁶Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak* (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016), h. 25.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui konsep pembedaan dalam hukum Islam terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan.
- b. Mengetahui bagaimana persepsi hakim mengenai sanksi pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan.
- c. Mengetahui upaya hukum agar anak tidak lagi melakukan tindak pidana penganiayaan.

2. Kegunaan penelitian

a. Kegunaan teoretis

1. Mengkaji dan membahas hal-hal yang berkaitan dengan judul penelitian, ini diharapkan dapat menambah pengetahuan yang dapat dipergunakan dan dimanfaatkan di dalam penulisan bidang ilmu hukum pidana khususnya sanksi pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan dalam hukum Islam.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai bahan informasi sekaligus sebagai bahan bacaan atau referensi khususnya dalam pendidikan ini sekaligus sebagai bahan pustaka.

b. Kegunaan praktis

- 1) Dapat memberikan informasi dan mengetahui tentang konsep pembedaan dalam hukum Islam terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan.

- 2) Dapat memberikan informasi dan mengetahui persepsi hakim mengenai sanksi pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan.
- 3) Dapat memberikan sumbangan pemikiran pada pihak yang terkait dalam menangani sanksi pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan.



BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Pengertian Tindak Pidana Anak dan Penganiayaan

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda “*Strafbaar feit*” atau “*Delict*”, atau “*Crime*” dalam bahasa Inggris. Namun dalam beberapa literature dan perundang-undangan hukum pidana, terdapat istilah lain yang dipakai oleh para sarjana untuk menerjemahkan *Strafbaar feit*, seperti: perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum, perbuatan yang boleh dihukum, dan lain-lain.¹

Perbuatan Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal dapat diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.²

Namun demikian, sudah ada kesepakatan menterjemahkan istilah “*Strafbaar feit*” dengan pengertian tindak pidana. Hal tersebut selain sudah banyak dipergunakan dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus termasuk sebagaimana dirumuskan dalam rancangan konsep KUHP. Alasan yang dikemukakan antara lain bahwa hukum pidana Indonesia didasarkan kepada perbuatan (*daad*) dan pembuatnya (*dader*). Dengan demikian, tindak pidana menunjuk kepada perbuatan yang dilarang

¹Nandan Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 9.

²Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), h. 59.

yang dilakukan oleh orang, baik perbuatan aktif maupun perbuatan pasif, termasuk perbuatan lalai.³

Apabila dihubungkan dengan masalah tindak pidana anak, maka terhadap anak yang telah melakukan *criminal act* selain perlu dikaji sifat dari perbuatannya, patut diuji pula masalah kemampuan bertanggungjawab. Dengan demikian, diperlukan adanya kecermatan bagi hakim dalam menangani anak yang disangka telah melakukan suatu tindak pidana, untuk menentukan masalah pertanggungjawaban pidananya.

Kenakalan remaja/anak disebut juga dengan *Juvenile Delinquency*. *Juvenile* atau yang (dalam bahasa Inggris) dalam bahasa Indonesia berarti anak-anak; anak muda, sedangkan *Delinquency* artinya terabaikan/mengabaikan yang kemudian diperluas menjadi jahat, criminal, pelanggar peraturan dan lain-lain. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, delikueni diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.

Pengertian *Juvenile Delinquency* menurut Kartini Kartono adalah perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah tingkah laku yang menyimpang.⁴

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia, jelas terkandung makna bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur:

³Nandan Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 10

⁴Wagiati Sutedjo, *Hukum Pidana Anak* (Cet. I; Bandung: PT. Refrika Aditama, 2006), h. 9.

- a. Adanya perbuatan manusia;
- b. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum;
- c. Adanya kesalahan;
- d. Orang yang berbuat harus dapat dipertanggung jawabkan.

Tindakan kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak merupakan manifestasi dari kepuberan remaja tanpa ada maksud merugikan orang lain seperti yang diisyaratkan dalam suatu perbuatan kejahatan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimana pelaku harus menyadari akibat dari perbuatannya itu serta pelaku mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan tersebut.

Penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si petindak.⁵

Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja (penganiayaan) dapat dibedakan menjadi 6 macam, yakni:

1. *Penganiayaan biasa*

Pemberian kualifikasi sebagai penganiayaan biasa (*gewone mishandeling*) yang dapat disebut juga dengan penganiayaan bentuk pokok atau bentuk standard terhadap ketentuan pasal 351 sungguh tepat, setidaknya untuk membedakannya dengan bentuk-bentuk penganiayaan lainnya.

Dilihat dari sudut cara pembentuk UU dalam merumuskan penganiayaan, kejahatan ini mempunyai suatu keistimewaan. Apabila pada rumusan kejahatan-kejahatan lain, pembentuk UU dalam membuat rumusannya adalah dengan menyebut

⁵Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), h. 12.

unsur tingkah laku dan unsur-unsur lainnya, seperti kesalahan, melawan hukum atau unsur mengenai obyeknya, mengenai cara melakukannya dan sebagainya, tetapi pada kejahatan yang diberi kualifikasi penganiayaan (351 ayat 1) ini, dirumuskan dengan sangat singkat, yaitu dengan menyebut kualifikasinya sebagai penganiayaan (*mishandeling*) sama dengan judul dari Bab XX, dan menyebutkan ancaman pidananya. Suatu rumusan yang amat singkat.

Pasal 351 merumuskan sebagai berikut:

- (1) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.⁶

2. *Penganiayaan ringan*

Kejahatan yang diberi kualifikasi sebagai penganiayaan ringan (*lichte mishandeling*) oleh UU ialah penganiayaan yang dimuat dalam pasal 352, yang rumusannya sebagai berikut:

- (1) - Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500.

⁶Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, h. 8.

- Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.

(2) Perbuatan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.⁷

3. *Penganiayaan berencana*

Pasal 353 mengenai penganiayaan berencana merumuskan sebagai berikut:

- (1) Penganiayaan dengan rencana lebih dulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.
- (2) Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.
- (3) Jika perbuatan itu menyebabkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

Ada 3 macam penganiayaan berencana, yakni:

- a. Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian.
- b. Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat.
- c. Penganiayaan berencana yang berakibat kematian.⁸

4. *Penganiayaan berat*

Penganiayaan yang oleh UU diberi kualifikasi sebagai penganiayaan berat, ialah dirumuskan dalam pasal 354 yang rumusannya adalah sebagai berikut:

- (1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun.
- (2) Jika perbuatan ini mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.

⁷Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, h. 22.

⁸Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, h. 26.

Penganiayaan berat hanya ada 2 bentuk, yakni:

- a. Penganiayaan berat biasa (ayat 1), dan
- b. Penganiayaan berat yang menimbulkan kematian (ayat 2).

5. *Penganiayaan berat berencana*

Penganiayaan berat berencana, dimuat dalam pasal 355, yang rumusannya adalah sebagai berikut:

- (1) Penganiayaan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.
- (2) Jika perbuatan itu menimbulkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

6. *Penganiayaan terhadap orang-orang berkualitas tertentu atau dengan cara tertentu yang memberatkan*

Macam penganiayaan yang dimaksudkan adalah sebagaimana yang dimuat dalam pasal 356, yang rumusannya adalah sebagai berikut:

Pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga:

- (1) Bagi yang melakukan kejahatan ini terhadap ibunya, ayahnya yang sah, istrinya atau anaknya.
- (2) Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
- (3) Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

Dalam hukum Islam tindak pidana (jarimah) pada dasarnya mengandung pengertian perbuatan buruk, jelek atau dosa. Jadi menurut makna bahasa pengertian

ini sama dengan pengertian jinayah. Menurut Abd. Qadir Audah, pengertian jarimah yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah swt dengan hukuman hudud atau hukuman takzir.

Atas dasar pengertian tersebut dapatlah dimengerti bahwa tindak pidana adalah melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan setiap perbuatan yang diperintahkan untuk melakukannya. Dapat juga diartikan melakukan atau meninggalkan perbuatan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam atas keharaman dan diancamkan hukuman terhadapnya. Dengan kata lain berbuat atau tidak berbuat, baru dianggap sebagai tindak pidana apabila telah ditetapkan dan diancamkan suatu hukuman terhadapnya.⁹

Dengan demikian istilah jarimah sama dengan perbuatan pidana, tindak pidana, peristiwa pidana atau delik dalam hukum pidana nasional. Artinya satuan atau sifat dari suatu pelanggaran hukum. Dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah jarimah.

B. Maksud dan Tujuan Sanksi Pidana

Dalam sistem hukum pidana, sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan didalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Sanksi pidana diartikan sebagai suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.

⁹Hamzah Hasan, *Hukum pidana Islam 1* (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 7.

Sanksi Pidana atau hukuman adalah suatu tindakan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis pada orang yang melanggar undang-undang hukum pidana. Hukuman dalam bahasa arab disebut ‘*uqubah* yang artinya mengiringnya. dalam hukum positif di Indonesia, istilah hukuman hampir sama dengan pidana. Walaupun sebenarnya seperti apa yang dikatakan oleh Wirjono Projodikoro, kata hukuman sebagai istilah tidak dapat menggantikan istilah pidana, oleh karena ada istilah hukuman pidana dan hukuman perdata seperti misalnya ganti kerugian.¹⁰ Sedangkan menurut Mulyanto, sebagaimana dikutip oleh Mustafa Abdullah, istilah pidana lebih tepat daripada hukuman sebagai terjemahan kata *straf*. Karena, jika *straf* diterjemahkan dengan hukuman maka *straf recht* harus diterjemahkan hukum hukuman.¹¹

Dalam hal yang demikian digunakan istilah hukuman dalam arti sempit yaitu hukuman dalam perkara pidana dan bukan dalam perkara-perkara lain seperti hukuman yang dijatuhkan oleh hakim dalam perkara perdata dan juga bukan hukuman terhadap pelanggar di luar undang-undang.

Hukuman sebagai sanksi dari suatu norma hukum tertentu adalah tanda dari hukum pidana itu, yang membedakannya dari bagian-bagian hukum yang lain. Sedangkan menurut Simorangkir S.H bahwa hukuman adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggar hukum (terhukum) setelah diberikan keputusan (vonis) Oleh majelis hakim dalam suatu persidangan.¹²

¹⁰Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia* (Cet. III; Jakarta-Bandung: PT Eresco, 1981), h.1.

¹¹Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana* (Cet. I; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983),h. 47.

¹²Sastro Weerjo, *Pendidikan Kewarganegaraan* (Bandung: Pribumi Mekar, 2007), h. 8.

Adapun yang dimaksud dengan hukum anak adalah sekumpulan peraturan hukum, yang mengatur tentang anak. Adapun hal-hal yang diatur dalam hukum anak itu, meliputi: siding pengadilan anak, anak sebagai pelaku tindak pidana, anak sebagai korban tindak pidana, kesejahteraan anak, hak-hak anak, pengangkatan anak, anak terlantar, kedudukan anak, perwalian, anak nakal, dan lain sebagainya.¹³

Sanksi pidana dalam Islam dapat dibedakan pada dua aspek yaitu “*uqubat badaniyah*” dan “*uqubat mudaniyah*”. *uqubat badaniyah*, suatu sanksi pidana fisik yang secara langsung dapat diterapkan kepada manusia dan *uqubat mudaniyah*, suatu sanksi pidana yang dikenakan kepada harta benda seseorang, baik dalam kedudukannya sebagai pengganti.¹⁴

Berdasarkan deskripsi pengertian sanksi pidana diatas dapat disimpulkan, bahwa pada dasarnya sanksi pidana merupakan suatu pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan (perbuatan pidana) melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan (hukum) yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi.

Esensi dari hukuman bagi pelaku suatu jarimah menurut Islam adalah *pertama*, pencegahan serta balasan (*ar-rad ‘u wa al-zajru*), dan kedua adalah perbaikan dan pengajaran (*al-islah wa at-tahzib*). Dengan tujuan tersebut, pelaku jarimah diharapkan tidak mengulangi perbuatannya. Di samping itu juga merupakan tindakan preventif bagi orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama.

¹³Darwan Prinst, *HukumAnak Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), h. 1.

¹⁴Sabri Samin, *Pidana Isam Dalam Politik Hukum Indonesia I, Eklektisme dan Pandangan Non Muslim* (Tangerang: Kholam Publishing, 2008), h. 109.

C. Dasar Hukum Penganiayaan dan Perlindungan Anak

Penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Yang menjadi dasar hukum penganiayaan dalam hukum Islam terdapat dalam QS Al-Maidah/ 5: 45

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

Terjemahnya:

Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.¹⁵

Ayat ini menjelaskan bagian lain dari ketetapan-ketetapan yang menyangkut kejahatan-kejahatan dan hukuman-hukuman Allah.

Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa. Jika seseorang melukai mata orang lain dan merusakkannya, maka orang lain itu juga boleh merusakkan mata orang itu, *mata dengan mata*. Dia juga boleh memotong hidung orang itu sebagai ganti hidungnya sendiri, *hidung dengan hidung*. Sebagai ganti dipotongnya telinganya, dia juga boleh memotong telinga orang itu, *telinga dengan telinga*. Dan jika seseorang memecahkan gigi orang lain, maka si korban boleh membalas memecahkan giginya. Ayat di atas mengatakan, *gigi dengan gigi*. Secara umum, setiap orang yang melukai orang lain,

¹⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Ar-Raafi', 2012), h. 115.

maka luka itu boleh dibalas, *dan luka-luka (pun) ada kisahnya*. Oleh karena itu, ketentuan kisas harus dilakukan dengan adil dan tanpa memandang perbedaan dari segi ras, kedudukan sosial, suku dan kepribadian. Akan tetapi, agar orang tidak membayangkan bahwa Allah telah menetapkan hukum kisas sebagai kewajiban yang kaku, maka segera sesudah ketetapan tersebut, ayat di atas menambahkan, *tetapi barang siapa yang melepaskan (hak kisas)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya*. Artinya, sebanyak dia memberikan maaf itu, maka Allah akan memaafkan dosa-dosanya. Dan, di akhir ayat ini, dikatakan, *dan barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim*. Kezaliman apa yang lebih besar daripada kita terlibat dalam perasaan kasihan yang palsu, dan membebaskan si pembunuh dengan mutlak dengan dalih bahwa darah tidak boleh dicuci dengan darah.¹⁶

Dengan demikian, ketentuan hukum dan sanksi bagi pelaku tindak pidana penganiayaan seperti dijelaskan diatas masih tetap relevan dan dapat diperpegangi dalam menyelesaikan kasus hukum yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Ketentuan tersebut lebih dapat memberi jaminan kepastian hukum, rasa keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat pencari keadilan.

Tindak pidana penganiayaan atau *mishandeling* itu diatur dalam Bab ke-XX Buku ke-II KUHP, yang dalam bentuknya yang pokok di atur dalam pasal 351-356 KUHP.¹⁷

Perlindungan anak dalam hukum pidana diatur dalam Konvensi Hak Anak Pasal 19, Pasal 37, Pasal 39 dan pasal 40, KUHAP-hukum material- Pasal 45, Pasal

¹⁶Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Quran* (Jilid 4; Al-Huda), h. 388.

¹⁷P. A. F. Lamintang & Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 131.

46 dan Pasal 47 dan Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang lebih rinci daripada KUHP dan menganut beberapa prinsip.¹⁸

Anak dan generasi muda sering diibaratkan sebagai mutiara berharga. Anak dalam perkembangannya membutuhkan bimbingan yang baik agar kehidupannya menjadi manusia yang berguna. Dalam perjalanannya, orang tua seharusnya menjaga, merawat serta mendidik anak dengan baik. Sehingga anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Anak sebagai generasi penerus bangsa dan penerus cita-cita perjuangan bangsa serta sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.

Dasar hukum perlindungan anak dalam Islam dijelaskan dalam Firman Allah QS Al-Tahrim/ 66: 6, yaitu:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُورًا أَنفُسُكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.¹⁹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang harus menjaga diri dan keluarganya dari siksa api neraka, sebab suatu saat akan dimintai pertanggung jawaban di akhirat. Karena anak adalah titipan yang harus dijaga dan dididik sebaik mungkin sehingga menjadi anak yang shaleh dan berguna bagi keluarganya dan agamanya.

¹⁸Wagati Sutedjo dan Melani, *Hukum pidana Anak* (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), h. 37.

¹⁹Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Ar-Raafi', 2012), h. 560.

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah SWT, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Anak sebagai amanah Allah harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa di masa datang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.²⁰

Dasar-dasar pelaksanaan hukum perlindungan anak di bagi menjadi 3, yaitu:

1. Dasar filosofis; Pancasila sebagai kegiatan dalam berbagai kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak; Pendekatan kesejahteraan sebagai dasar filosofis perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak berupa *protection child and fulfillment child rights based approach (to respect, to protect and to fulfill)*; Anak mempunyai eksistensi sebagai anak manusia yang merupakan totalitas kehidupan dan kemanusiaan.
2. Dasar etis; pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan dan kekuatan.

²⁰Andi Syamsu Alam dan M.Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 1.

3. Dasar yuridis; pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sebagai peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integrative, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

Dasar filosofis, etis dan yuridis merupakan pedoman pengkajian, evaluasi apakah ketentuan-ketentuan yang dibuat dan pelaksanaan yang direncanakan benar-benar rasional positif dapat dipertanggung jawabkan dan bermanfaat bagi yang bersangkutan. Dasar-dasar ini dapat diambil dan dikembangkan bagi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ajaran dan pandangan yang positif dari agama dan nilai sosial yang tradisional maupun yang modern.²¹

D. Hak-hak Anak dan Perlindungan Hukumnya di Indonesia

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwa sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum bagi anak-anak, maka dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 34 telah ditegaskan bahwa “*Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara*”. Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap hak-hak anak dan

²¹ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak* (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016), h. 14.

perlindungannya. Lebih lanjut pengaturan tentang hak-hak anak dan perlindungannya ini terpisah dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Dalam bidang hukum dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
2. Dalam bidang kesehatan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, diatur dalam Pasal 128 s/d 135.
3. Dalam bidang Pendidikan dengan Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Dalam bidang Tenaga Kerja dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 68 s/d 75 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan Bekerja.
5. Dalam bidang Kesejahteraan Sosial dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
6. Perlindungan Anak secara lebih komprehensif diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.²²

Lebih lanjut pengaturan hak-hak anak di Indonesia saat ini, juga diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan keputusan presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan Konvensi Hak-hak Anak. Dalam pasal 1 butir 12 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa anak adalah bagian dari hak asasi manusia

²²Wagiati Sutedjo dan Melani, *Hukum pidana Anak* (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), h. 50.

yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.

Berdasarkan Konvensi Hak-hak Anak, secara umum dapat digolongkan menjadi 4 (empat) golongan hak-hak anak, yaitu:

1. Hak untuk kelangsungan hidup;
2. Hak terhadap perlindungan;
3. Hak untuk tumbuh kembang;
4. Hak untuk berpartisipasi.

Upaya perlindungan terhadap anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Hal ini bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif. Undang-undang perlindungan anak juga harus meletakkan kewajiban memberikan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas non diskriminatif, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak.²³

Dari ajaran islam hak anak tersebut, maka diperoleh pelajaran bahwa Islam memandang bahwa hak-hak anak semenjak dalam kandungan, bahkan sebelum itu untuk dilindungi dan diberikan perhatian dan perlindungan secara optimal. Islam memandang penting pembinaan anak sebagai calon pemimpin masa depan melalui peran keluarga dan masyarakat serta Negara.

²³Andi Syamsu Alam dan M.Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 2.

E. Penangkapan, Penahanan, dan Jenis Sanksi Terhadap Anak

1. Penangkapan

Pasal 1 butir 20 KUHP memberi definisi penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengkekangan kebebasan sementara waktu tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Kalau definisi ini dibandingkan dengan bunyi pasal 16 yang mengatur tentang penangkapan, maka nyata tidak cocok. Pasal 16 mengatakan sebagai berikut:

1. Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan.
2. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.²⁴

Tidak cocok karena ternyata bukan saja penyidik (menurut definisi) tetapi juga penyelidik dapat melakukan penangkapan. Bahkan setiap orang dalam hal tertangkap tangan dapat melakukan penangkapan. Juga alasan penangkapan, ternyata bukan saja untuk kepentingan penyidikan tetapi juga untuk kepentingan penyelidikan.

Menurut pasal 43 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 bahwa penangkapan Anak Nakal pada dasarnya masih diberlakukan ketentuan kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Namun demikian yang patut diperhatikan dalam masalah penangkapan Anak Nakal adalah kapan dan bilamana penangkapan itu dimungkinkan menurut Undang-undang. Dalam hal ini terdapat dua hal, yaitu:

- a. Dalam hal tertangkap tangan;
- b. Dalam hal bukan tertangkap tangan.²⁵

²⁴Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 128.

Berdasarkan pasal 18 ayat (1) KUHAP bahwa pelaksanaan penangkapan dilakukan oleh Polri dengan surat perintah penangkapan secara tertulis; dan pasal 18 ayat (2) KUHAP mengatur dalam tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah dengan catatan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada pada pejabat yang berwenang, yaitu penyidik.

Perlu diingat bahwa dalam pasal 17 KUHAP ditentukan bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana. Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.

Dalam pasal 30 UU No. 11 Tahun 2012 merumuskan sebagai berikut:

- (1) Penangkapan terhadap anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam.
- (2) Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak.
- (3) Dalam hal ruang pelayanan khusus anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, anak dititipkan di LPKS.
- (4) Penangkapan terhadap anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- (5) Biaya bagi setiap anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

²⁵Wagiati Sutedjo dan Melani, *Hukum pidana Anak* (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), h. 35.

Penjelasan pasal 30 ayat 1 UU No. 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa perhitungan 24 (dua puluh empat) jam masa penangkapan oleh penyidik dihitung berdasarkan waktu kerja.²⁶

2. Penahanan

Penahanan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 adalah penempatan tersangka atau terdakwa di Rumah Tahanan Negara, Cabang Rumah Tahanan Negara atau tempat lain.

Menurut pasal 45 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, ada dua alasan penahanan terhadap para pelaku pidana yang masih di bawah umur, yaitu:

- a. Untuk kepentingan anak;
- b. Untuk kepentingan masyarakat.

Kedua alasan tersebut harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.²⁷

Pada dasarnya penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan, namun penahanan terhadap anak harus pula memperhatikan kepentingan anak yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental maupun sosial anak dan kepentingan masyarakat. Tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa. Hal ini dimaksudkan untuk memnghindarkan anak terhadap pengaruh-pengaruh buruk yang dapat diserap melalui konteks kultural dengan tahanan lain.

²⁶R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Garfika, 2016), h. 71.

²⁷Wagiati Sutedjo dan Melani, *Hukum pidana Anak* (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), h. 36.

Pasal 32 UU No. 11 Tahun 2012 merumuskan sebagai berikut:

- (1) Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua atau wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.
- (2) Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
 - b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.
- (3) Syarat penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.
- (4) Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap terpenuhi.
- (5) Untuk melindungi keamanan anak, dapat dilakukan penempatan anak di LPKS.

Dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 disebutkan bahwa pada dasarnya penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan, tetapi penahanan terhadap anak harus pula memperhatikan kepentingan anak yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, maupun sosial anak dan kepentingan masyarakat.²⁸

²⁸R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Garfika, 2016), h. 72.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan “lembaga” adalah lembaga, baik pemerintah maupun swasta, dibidang kesejahteraan sosial anak, antara lain panti asuhan dan panti rehabilitasi.

Pasal 33 UU No. 11 Tahun 2012 dirumuskan sebagai berikut:

- (1) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari.
- (2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 atas permintaan penyidik dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 8 (delapan) hari.
- (3) Dalam hal waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 telah berakhir, anak wajib dikeluarkan demi hukum.
- (4) Penahanan terhadap anak dilaksanakan di LPAS.
- (5) Dalam hal ini tidak terdapat LPAS, penahanan dapat dilakukan di LPKS setempat.

Pasal 34 UU No. 11 Tahun 2012 berbunyi:

- (1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 (lima) hari.
- (2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 atas permintaan penuntut umum dapat diperpanjang oleh hakim Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 telah berakhir, anak wajib di keluarkan demi hukum.

Pasal 35 UU No. 11 Tahun 2012 berbunyi:

- (1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk pemeriksaan di sidang pengadilan penuntutan, hakim dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 atas permintaan hakim dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri paling lama 15 (lima belas) hari.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 telah berakhir dan hakim belum memberikan putusan, anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Pasal 36 UU No. 11 Tahun 2012 berbunyi: Penetapan pengadilan mengenai penyitaan barang bukti dalam perkara anak harus ditetapkan paling lama 2 (dua) hari.

Pasal 37 UU No. 11 Tahun 2012 merumuskan sebagai berikut:

- (1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan ditingkat banding, hakim banding dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 atas permintaan hakim banding dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi paling lama 15 (lima belas) hari.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 telah berakhir dan hakim banding belum memberikan putusan, anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Pasal 38 UU No. 11 Tahun 2012 merumuskan sebagai berikut:

- (1) Dalam hal penahan terpaksa dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan ditingkat kasasi, hakim kasasi dapat melakukan penahanan paling lama 15 (lima belas) hari.

- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 atas permintaan hakim kasasi dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 telah berakhir dan hakim kasasi belum memberikan putusan, anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Pasal 40 UU No. 11 Tahun 2012 merumuskan sebagai berikut:

- (1) Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada anak dan orang tua atau wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum.
- (2) Dalam hal pejabat tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, penangkapan atau penahanan terhadap anak batal demi hukum.

3. Jenis sanksi terhadap anak

Dalam hal ini yang dimaksud dengan sanksi adalah akibat hukum bagi pelanggar ketentuan Undang-undang atau suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah atau Undang-undang.

Hukum dan menghukum, merupakan dua pengertian yang satu sama lain kontradiktif. Semua orang merindukan hukum, tetapi tidak seorangpun yang merindukan hukuman. Meskipun hal itu sangat kontradiktif satu sama lain, tetapi antara keduanya tak dapat dipisahkan karena hukum tanpa sanksi tidak ada artinya.²⁹

Pengertian menghukum secara formal ialah menerapkan hukum menurut bunyi harfiahnya tentu tidak sama dengan menghukum dengan memperhatikan dan mengindahkan berbagai segi hukum itu sendiri. Sebagai contoh, misalnya A adalah

²⁹Wagiati Sutedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), h. 39.

anak seorang pejabat tinggi yang menyebabkan matinya seseorang dengan senjata api tanpa izin. Terhadap si A dapat dituntut atas dua tuntutan, ialah (1) menghilangkan nyawa orang lain, dan (2) mempunyai/menguasai senjata tanpa izin. Katakanlah si A telah terbukti dipersidangan melakukan kedua perbuatan itu, lalu yang menjadi pertanyaan hukuman apakah yang tepat untuk dikenakan terhadap anak tersebut?

Jika berdasarkan kesalahan yang terbukti dan sesuai dengan Undang-undang kemudian anak dijatuhi hukuman 10 tahun untuk kedua perbuatannya itu, mungkin masyarakat memuji sikap hakim atas putusan itu. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah hukuman tersebut akan membuat anak menjadi baik? Tepatkah bila anak dihukum seperti itu? Apabila memuaskan masyarakat mungkin tepat, tetapi dalam hal ini hakim dihadapkan pada dua kepentingan, yaitu di satu pihak memenuhi kepentingan masyarakat agar hukum dapat ditegakkan tanpa pilih bulu, di lain pihak mengingat masa depan serta kepentingan si anak dan jiwanya belum matang maka kembali ditinjau tujuan diadakan hukum. Hukum tidak bertujuan untuk memuaskan, tetapi bertujuan untuk menciptakan keadilan yang sesuai dengan kesadaran hukum. Jadi hakim yang bijaksana dalam pemeriksaan di persidangan harus melihat persoalan dari berbagai segi dan patut mempertimbangkan penyebab kesalahan, apakah dari kelalaian atau sengaja, apakah dilakukan pertama kali atau kesekian kalinya?

Al-Qur'an menjamin hak asasi manusia, termasuk kewajiban menegakkan keadilan dan kebebasan manusia sebagai makhluk sosial dan *khalifahtullah fi al-'ard*, sebagaimana firman-Nya dalam QS al-Maidah/5: 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَا تَعْدِلُوا ۖ اَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.³⁰

Ayat ini mengajak untuk menegakkan keadilan. Mula-mula, ia berbicara kepada orang-orang yang beriman dan mengatakan, *Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil*. Setelah itu, ayat ini menunjuk kepada salah satu faktor penyimpangan dari keadilan dan memperingatkan kaum Muslim bahwa kebencian dan permusuhan kesukuan, atau masalah-masalah pribadi, tidak boleh menghalangi pelaksanaan keadilan dan tidak boleh menyebabkan pelanggaran atas hak-hak orang lain karena keadilan adalah sesuatu yang melampaui itu semua. Ayat diatas mengatakan, *Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil*. Karena pentingnya permasalahan, ayat di atas menekankan masalah keadilan sekali lagi, dengan mengatakan, *Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa*. Dan keadilan adalah unsur yang paling penting dalam ketakwaan dan kesalehan, maka untuk ketiga kalinya ayat di atas menekankan bahwa, *sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan*.³¹

Dalam hukum pidana belanda, jenis sanksi pidana terhadap anak adalah sebagai berikut:

1. Pidana pokok (*principal penalties*)

- a. Untuk kejahatan: kurungan anak atau denda;

³⁰Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Ar-Raafi', 2012), h. 108.

³¹Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Quran* (Jilid 4; Al-Huda), h. 317.

- b. Untuk pelanggaran: denda.
- 2. Sanksi alternatif (*alternative sanction*) – pengganti pidana pokok
 - a. Kerja sosial;
 - b. Memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana;
 - c. Mengikuti proyek latihan.
- 3. Pidana tambahan (*additional penalties*)
 - a. Perampasan barang;
 - b. Pencabutan sim.
- 4. Tindakan (*measures*)
 - a. Penempatan pada lembaga khusus untuk anak;
 - b. Penyitaan;
 - c. Perampasan keuntungan yang diperoleh secara melawan hukum;
 - d. Kompensasi (ganti rugi).³²

Mengenai jenis-jenis dari sanksi pidana menurut UU No. 11 Tahun 2012 adalah sebagai berikut

a. Pidana Peringatan.

Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.

b. Pidana dengan syarat.

Pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada anak yang tidak perlu dilaksanakan asal selama menjalani masa pidana, memenuhi syarat umum berupa tidak akan melakukan tindak pidana dan syarat khusus berupa untuk melakukan atau tidak melakukan hak tertentu yang dalam putusan hakim.

³²Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), h. 10.

- Pembinaan di luar lembaga;
 - Pelayanan masyarakat;
 - Pengawasan.
- c. Pelatihan kerja.
- d. Pembinaan dalam lembaga.
- e. Penjara.³³

F. Pertimbangan Hukum terhadap Perlakuan Anak dalam Menerapkan Sanksi Pidana

Dalam hal proses persidangan, Pemisahan sidang anak dan sidang yang mengadili perkara tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa memang mutlak adanya, karena dengan dicampurnya perkara yang dilakukan oleh anak dan oleh orang dewasa tidak akan menjamin terwujudnya kesejahteraan anak. Dengan kata lain, pemisahan ini penting dalam hal mengadakan perkembangan pidana dan perlakuannya.

Pentingnya mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan sebelum hakim mengambil keputusan, UUPA telah memberikan perhatian sebagaimana yang disepakati dalam rule 16 *Beijing rules*. Persoalan yang dirasakan perlu diperhatikan adalah menyangkut pedoman dan pola pemidanaan. Pentingnya memperhatikan masalah tersebut disebabkan karena pidana dan pemidanaan merupakan jantungnya dalam setiap sistem peradilan pidana yang juga mempunyai posisi sentral. Hal tersebut disebabkan pula karena keputusan yang berupa penjatuhan pidana akan mengandung konsekuensi yang sangat luas, baik yang menyangkut

³³R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Garfika, 2016), h. 141.

pelaku tindak pidana, korban maupun masyarakat. Lebih-lebih kalau keputusan tersebut dinilai kontroversial, sebab kebenaran sendiri pada hakikatnya bersifat nisbi tergantung darimana kita memandangnya.³⁴

Sejak adanya sangkaan atau diadakan penyidikan sampai diputuskan pidananya dan menjalani putusan tersebut, anak harus didampingi oleh petugas sosial yang membuat *Case Study* tentang anak.

Adapun yang tercantum dalam *Case Study* ialah gambaran keadaan si anak, berupa:

- 1) Masalah sosialnya;
- 2) Kepribadiannya;
- 3) Latar belakang kehidupannya, misalnya:
 - Riwayat sejak kecil;
 - Pergaulannya di luar dan di dalam rumah;
 - Keadaan rumah tangga si anak;
 - Hubungan antara Bapak, Ibu, dan si anak;
 - Hubungan si anak dengan keluarganya, dan lain-lain;
 - Latar belakang saat dilakukan tindak pidana tersebut.³⁵

Case Study ini sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan anak dikemudian hari, karena di dalam memutuskan perkara anak dengan melihat *Case Study* dapat dilihat dengan nyata keadaan si anak secara khusus (pribadi). Sedangkan apabila hakim yang memutus perkara anak tidak dibantu dengan pembuatan *Case*

³⁴Nandan Sambas, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia dan Instrumen Perlindungan Anak serta Penerapannya* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 174.

³⁵Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), h. 41.

Study, maka hakim tidak akan mengetahui keadaan sebenarnya dari si anak sebab hakim hanya boleh bertemu terbatas dalam ruang sidang yang hanya memakan waktu beberapa jam saja dan biasanya dalam *Case Study* petugas BISPA menyarangkan pada hakim tindakan-tindakan yang sebaiknya diambil oleh para Hakim guna kepentingan dan lebih memenuhi kebutuhan anak.

Dalam hubungan ini, putusan-putusan hakim pun harus mengandung rasa keadilan agar dipatuhi oleh masyarakat. Rakyat harus ditingkatkan kecintaanya terhadap hukum, sekaligus mematuhi hukum itu sendiri, seperti firman-Nya dalam QS an-Nisa'/4: 65

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

Terjemahnya:

Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau (Muhammad) sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, (sehingga) kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.³⁶

Dalam sebuah hadis, Imam ash-Shadiq as mengatakan, "Jika sekelompok orang menyembah Allah dengan menegakkan shalat, melaksanakan ibadah haji, membayar zakat dan lain-lain untuk memuja-Nya, tetapi mereka meragukan perbuatan-perbuatan Rasulullah saw, maka sesungguhnya mereka bukanlah orang-orang yang beriman." Kemudian beliau membacakan ayat ini. *Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau (Muhammad) sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, (sehingga) kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan*

³⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Ar-Raafi', 2012), h. 88.

mereka menerima dengan sepenuhnya. Bagaimanapun, tanda-tanda orang beriman sejati ada tiga:

1. Alih-alih merujuk kepada tuhan-tuhan palsu (thaghut), dia berpaling kepada pengadilan Nabi saw.
2. Dia tidak boleh curiga terhadap keputusan Rasulullah saw. *Mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka.*
3. Dia harus menerima perintah Nabi saw dengan penuh semangat dan tunduk kepadanya.

Bagaimanapun, pengadilan termasuk dalam fungsi kerasulan dan kewalian. Dan sikap pribadi terhadap teks al-Quran yang suci adalah terlarang, sebab perilaku demikian menunjukkan ketiadaan iman.³⁷

Demikianlah walaupun *Case Study* ini tidak mengikat hakim, namun ia merupakan alat pertimbangan yang mau tidak mau wajib diperhatikan oleh hakim, sehingga menjadi pedoman bagi hakim dalam memutus perkara pidana anak.

Pertimbangan pidana dan perlakuannya terhadap anak-anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapat perhatian khusus, sebab pada peradilan anak ini keputusan hakim tersebut harus mengutamakan pemberian bimbingan edukatif terhadap anak-anak, disamping tindakan yang bersifat menghukum.

Case Study ini dapat menentukan hukuman manakah yang sebaiknya bagi si anak, maka hakim dapat memutuskan salah satu dari tiga kemungkinan:

- a. Anak itu dikembalikan kepada orang tua atau walinya, dengan tidak dijatuhi hukuman suatu apa;

³⁷ Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Quran* (Jilid 4; Al-Huda), h. 89.

- b. Anak itu dijadikan anak Negara, maksudnya tidak dijatuhi hukuman, akan tetapi diserahkan kepada Rumah Pendidikan Anak-anak untuk mendapat didikan dari Negara sampai anak itu berumur 18 tahun. Hal ini hanya dapat dilakukan bila anak itu telah berbuat suatu kejahatan atau pelanggaran.
- c. Anak itu dijatuhi hukuman seperti biasa, dalam hal ini ancaman hukuman dikurangkan dengan sepertiganya.³⁸

Dengan tiga macam kemungkinan itu, kepada hakim diberikan kesempatan untuk menimbang tentang kecakapan rohani terdakwa yang masih muda tersebut. Apabila misalnya hakim berpendapat, bahwa anak-anak yang umurnya 9 tahun atau 13 tahun kecakapan akalnya ternyata tidak normal perkembangannya, maka sudah cukup hakim mengirimkan kembali anak-anak itu kepada orang tuanya, wali atau orang yang memeliharanya dengan tidak dijatuhkan suatu hukuman. Akan tetapi apabila hakim menganggap anak-anak yang berumur 13 atau 15 tahun telah berbuat suatu kejahatan dengan akal yang cukup mampu untuk membedakan, hakim ada kesempatan pula untuk menjatuhkan hukuman akan tetapi hukuman yang dijatuhkan itu tidak boleh lebih dari dua pertiga maksimum hukuman yang diancamkan.

Menurut pasal 46 KUHP:

- (1) Jika hakim memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, maka ia dimasukkan dalam Rumah Pendidikan Negara supaya menerima pendidikan dari pemerintah atau dikemudian hari dengan cara lain, atau diserahkan kepada seorang tertentu yang bertempat tinggal di Indonesia atau suatu badan hukum, yayasan atau lembaga amal yang berkedudukan di Indonesia untuk menyelenggarakan pendidikannya, atau

³⁸Nandan Sambas, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia dan Instrumen Perlindungan Anak serta Penerapannya* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 164.

dikemudian hari, atas tanggungan pemerintah, dengan cara lain; dalam kedua hal di atas, paling lama sampai orang yang bersalah itu mencapai umur 18 tahun.

- (2) Aturan untuk melaksanakan ayat 1 pasal ini ditetapkan dengan Undang-undang.

Pasal tersebut merupakan aturan administrasi tentang apa yang harus dikerjakan, apabila hakim telah memberi perintah, bahwa tersalah akan diserahkan kepada pemerintah. Penyerahan ini selesai jika telah mencapai umur 18 tahun. Administrasi itu dapat memilih antara penempatan dalam Rumah Pendidikan Negara atau mempercayakan untuk dididik oleh orang lain, perserikatan, lembaga atau badan kesosialan partikulir.

Pasal 47 KUHP menyatakan bahwa:

- (1) Jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap tindak pidananya dikurangi sepertiga.
- (2) Jika perbuatan itu merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling 15 tahun.
- (3) Pidana tambahan dalam pasal 10 butir b, nomor 1 dan 3, tidak dapat diterapkan.³⁹

³⁹Nandan Sambas, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia dan Instrumen Perlindungan Anak serta Penerapannya* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 165.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif (*field research*). Selain itu, juga menggunakan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap objek yang menjadi pokok permasalahan. Adapun lokasi penelitian adalah Pengadilan Negeri Sungguminasa.

B. Pendekatan penelitian

a. Pendekatan Syar'i

Pendekatan syar'i yaitu pendekatan dengan menggunakan ilmu syariah terkhusus fiqh Islam yang terkait dengan sanksi pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan yang dapat dijadikan sebagai acuan pembahasan.

b. Yuridis Normatif

Yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan yuridis empiris yaitu pendekatan yang meninjau dan menganalisa masalah dengan menggunakan prinsip-prinsip dan berdasarkan data kepustakaan melalui *library research*. Penelitian ini menekankan segi-segi yuridis, dengan melihat pada peraturan *perundang-undangan* dan *penetapannya*.

C. Sumber Data

Ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, adapun sumber data yang digunakan akan dijelaskan sebagai berikut:

Data primer merupakan data yang dikumpulkan dalam melakukan penelitian di lapangan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan cara-cara seperti *interview* yaitu berarti kegiatan terjun langsung ke lapangan dengan mengadakan wawancara pada informan penelitian untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai sanksi pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan dan didukung oleh data-data kuantitatif.

Adapun sumber data primer ini jumlahnya 4 orang *informan*. Dari 4 orang tersebut terdiri dari Ketua Pengadilan, dan Hakim 3 orang, jumlah 4 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel I

Tentang Informan

NO	NAMA	INFORMAN	KET
1	Ketua Pengadilan	1 orang	
3	Hakim	3 orang	
JUMLAH		4 orang	

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dalam penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah teknik untuk mencari bahan-bahan atau data-data yang bersifat sekunder yaitu data yang erat hubungannya dengan bahan primer dan dapat dipakai untuk menganalisa permasalahan. Data sekunder dikumpulkan melalui *Library research* dengan jalan menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan dan publikasi lainnya yang ada relevansinya dengan judul skripsi ini. Metode ini menggunakan dua kutipan sebagai berikut:

1) Kutipan Langsung

Penulis langsung mengutip pendapat atau tulisan orang lain secara langsung sesuai dengan aslinya, tanpa sedikitpun merubah susunan redaksinya.

2) Kutipan Tidak Langsung

Penulis mengutip pendapat orang lain dengan cara menformulasikan ke dalam susunan redaksi yang baru, tanpa sedikitpun merubah susunan redaksinya, mengutip pendapat orang lain dengan cara meringkasnya tetapi inti dari pendapat tersebut tetap sama.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan atau metode pengumpulan data yang dilakukan dengan bertatapapan langsung dengan responden, sama seperti penggunaan daftar pertanyaan.¹ Oleh karena itu peneliti menggunakan metode ini karena dianggap lebih efektif dalam memperoleh data.

¹Moechar Daniel, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi* (Jakarta: PT Bumi Askara, 2002), h. 143.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat dokumen-dokumen bisa berbentuk tulisan (peraturan dan keputusan), gambar atau karya-karya yang momental yang bersangkutan dengan penelitian ini.

c. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.² Penggunaan metode observasi dalam penelitian di atas mempertimbangkan bahwa data yang dikumpulkan secara efektif yang dilakukan secara langsung dengan mengamati objek. Penulis menggunakan teknik ini untuk mengetahui kenyataan yang ada di lapangan, alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati, mencatat dan menganalisa secara sistematis. Pada observasi ini penulis akan menggunakannya dengan maksud untuk mendapatkan data yang efektif mengenai peran sanksi pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan.

d. Studi Kepustakaan

Penelitian kepustakaan adalah bentuk penelitian dengan cara mengumpulkan atau menelusuri dokumen-dokumen atau keterangan-keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian. Adapun di dalam hal ini penulis akan menganalisa perbandingan pelaksanaan yang akan diperoleh dari literatur-literatur mengenai hukum, undang-undang, internet, serta semua bahan yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas nantinya.

²Husaini Usman Poernomo, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h.54.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen Penelitian adalah alat pengumpulan data yang disesuaikan dengan jenis penelitian yang dilakukan dengan merujuk pada metodologi penelitian.³ Instrumen atau alat peneliti adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh penelitian kualitatif siap melakukan peneliti yang selanjutnya terjun kelapangan. Adapun alat-alat yang harus disiapkan oleh peneliti untuk meneliti adalah sebagai berikut:

a. Pedoman wawancara

Pedoman Wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan yang berupa daftar pertanyaan.

b. Buku catatan dan pulpen

Buku catatan dan pulpen yaitu alat yang berfungsi untuk mencatat dan menulis semua percakapan dengan sumber data.

c. Kamera

Kamera yaitu alat berfungsi untuk memotret jika peneliti sedang melakukan pembicaraan dengan informan.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data secara sederhana diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini adalah:

³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah: Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Laporan Penelitian* (Makassar: Alauddin Press, 2013), h.17.

1) *Editing data*

Editing data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui *relevansi* (hubungan) dan keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini dilakukan dengan tujuan memperbaiki kualitas data serta menghilangkan keraguan-raguan atas data yang diperoleh dari hasil wawancara.

2) *Coding data*

Coding data adalah penyesuaian data yang diperoleh dalam melakukan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dengan pokok pangkal pada permasalahan dengan cara memberi kode-kode tertentu pada setiap data tersebut.

b. Analisis Data

Teknik analisis data bertujuan menguraikan data dan memecahkan masalah yang berdasarkan data yang diperoleh. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih-milihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kembali.

G. Pengujian Keabsahan Data

Suatu penelitian diorientasikan pada derajat keilmiahan data penelitian. suatu penelitian dituntut agar memenuhi standar penelitian sampai dapat memperoleh kesimpulan yang objektif. Maksudnya bahwa suatu penelitian bila telah memenuhi

standar objektivitas maka penelitian tersebut dianggap telah teruji keabsahan data penelitiannya.

Dalam menguji keabsahan data yang diperoleh guna mengukur validitas hasil penelitian, dituntut meningkatkan ketekunan dalam penelitian. Pengamatan yang cermat dan berkesinambungan dengan menggunakan teknik triangulasi.

Teknik triangulasi dalam penelitian merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya.⁴ Tetapi triangulasi yang dimaksud pada penelitian ini adalah triangulasi sumber data penelitian.



⁴Lexy J.Moleon, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), h. 178.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

1. Sejarah dan Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa

Sejak tahun 1959 perkara-perkara dalam wilayah hukum kabupaten Gowa di sidang di Pengadilan Negeri Makassar. Kemudian pada tahun 1964 setelah keluar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan Mengubah Undang-Undang No 47 PRP Tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 No. 7) menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Kemudian Pengadilan dibentuk di Kabupaten Gowa dan berkantor sementara di kantor Daerah Kabupaten Gowa dan bernama Pengadilan Ekonomi Sungguminasa. Di kantor Daerah Kabupaten Gowa, Pengadilan Ekonomi Sungguminasa hanya menempati satu ruangan sehingga perkara-perkara yang ada di Pengadilan Negeri Sungguminasa masih di sidang di Pengadilan Makassar.

Beberapa bulan setelah resmi dibentuk juga di tahun 1964 Gedung Kantor Pengadilan Ekonomi Sungguminasa selesai dibangun. Gedung kantor Pengadilan Ekonomi Sungguminasa beralamat di Jl. HOS Cokroaminoto Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa (sekarang Kantor Bank Sulsel cabang Gowa). Namun status kantor adalah Pinjam Pakai dari Pemerintah

Kabupaten Gowa. Tapi persidangan perkara masih dilaksanakan di Pengadilan Makassar sampai dengan tahun 1970-an.

Pada tahun 1965 Pengadilan Ekonomi Sungguminasa berubah menjadi Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas II A. Karena Gedung kantor sudah tidak representatif lagi maka pada tanggal 25 Mei 1977 diusulkan permintaan Gedung Baru. Tahun 1979 Gedung baru selesai dibangun dan diresmikan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum bapak H. Soeroto pada tanggal 02 Februari 1980 di jalan Usman Salengke No. 103 Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.

Pengadilan Negeri Sungguminasa menjadi Kelas I B berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 27 Februari 2004 Nomor M.01-AT.01.05 Tahun 2004 tentang Peningkatan Kelas Pengadilan dan Sekretariat Pengadilan Negeri Pada Pengadilan Negeri Limboto, Pengadilan Negeri Selong, Pengadilan Negeri Tarakan, Pengadilan Negeri Makale, Pengadilan Negeri Indramayu, Pengadilan Negeri Sungguminasa dan Pengadilan Negeri Pariaman dari Kelas II menjadi Kelas. Peresmian Peningkatan Kelas Pengadilan Negeri Sungguminasa dari Kelas II menjadi Kelas I dilakukan Oleh Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH, MCL pada tanggal 07 Maret 2005. Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa dari masa ke masa yaitu :

- a. Abdul Madjid, SH.MH dari tahun 1964 sampai 1971
- b. M. Siringo Ringo dari tahun 1971 sampai 1980
- c. Mannan Rahman, SH dari tahun 1980 sampai 1986
- d. I Ketut Galung Astika, SH dari tahun 1986 sampai 1990
- e. Marsoedi Tjokro Waskito, SH dari tahun 1990 sampai 1993

- f. H. M Arsyad Sanusi dari tahun 1993 sampai 1996
- g. Muhammad, SH dari tahun 1996 sampai 1998
- h. Andi Norma, SH dari tahun 1998 sampai 1999
- i. H.A.Muh. Yunus P, SH dari tahun 1999 sampai 2004
- j. H. Lexsy Mamonto, SH, MH dari tahun 2005 sampai 2007
- k. Agus Budiarto, SH, MH dari tahun 2007 sampai 2008
- l. Andi Isna Renishwari Cinrapole, SH dari tahun 2008 sampai 2011
- m. Ennid Hasanuddin, SH, CN, M.HUM dari tahun 2011 sampai 2012
- n. Herdi Agustien, SH, M.HUM dari tahun 2012 sampai 2013
- o. Tahsin, SH. MH dari tahun 2013 sampai 2014
- p. H. Minanoer Rachman, SH. MH dari tahun 2014 sampai 2016
- q. Mochammad Djoenaidie, SH, MH dari tahun 2016 sampai sekarang

Kemudian untuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa meliputi wilayah administratif Pemerintah Kabupaten Gowa yang terdiri dari 18 (delapan belas) kecamatan dan 167 (seratus enam puluh tujuh) desa/kelurahan.

Adapun 18 kecamatan yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa diantaranya:

- 1) Kecamatan Somba Opu
- 2) Kecamatan Pallangga
- 3) Kecamatan Barombong
- 4) Kecamatan Bajeng
- 5) Kecamatan Bajeng Barat
- 6) Kecamatan Bontonompo
- 7) Kecamatan Bontomarannu

- 8) Kecamatan Pattallang
- 9) Kecamatan Bontonompo Selatan
- 10) Kecamatan Parangloe
- 11) Kecamatan Manuju
- 12) Kecamatan Tinggimoncong
- 13) Kecamatan Tombolopao
- 14) Kecamatan Tompobulu
- 15) Kecamatan Biringbulu
- 16) Kecamatan Bungaya
- 17) Kecamatan Bontolempangan
- 18) Kecamatan Parigi

2. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Sungguminasa

Adapun visi dan Misi Pengadilan Negeri sungguminasa adalah sebagai berikut:

a. Visi

“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”

b. Misi:

- 1) Menjaga kemandirian badan peradilan.
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

B. Konsep Pemidanaan dalam Hukum Islam Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan

Pemidanaan atau hukuman merupakan salah satu perangkat dalam hukum pidana sebagai bentuk balasan bagi pelaku tindak pidana, karena ia merupakan representasi dari perlawanan masyarakat terhadap para pelaku dan tindakan yang dilakukannya.

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku jarimah berdasarkan pertanggung jawabannya. Apabila ia telah memenuhi syarat untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka ia akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku dalam syari'at Islam. Hukum Islam menetapkan bahwa sanksi pidana dijatuhkan kepada orang yang sudah dewasa.

Dalam hukum Islam, bahwa dalam ketentuannya, anak di bawah umur yang telah melakukan sesuatu perbuatan melanggar ketentuan hukum syariat, seperti penganiayaan anak dibawah umur sekalipun itu semi sengaja, maka baginya adalah tidak dikenakan sanksi pidana, hukumannya bisa diganti dengan membayar denda/ kifarat, atau juga bisa diganti dengan kegiatan pendidikan yang dianjurkan dalam syariat Islam. Dalam sebuah Hadis yang diriwayatkan oleh imam Ahmad dan Abu Daud di sebutkan :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَ عَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ

Terjemahan:

Dari Aisyah ra, ia berkata: telah bersabda Rasulullah saw“: dihapuskan (dimaafkan dosa) ketentuan dari tiga hal, dari orang yang tidur sampai ia bangun, dari orang yang gila sampai ia sembuh (sehat), dan anak kecil sampai ia dewasa.(sampai berakal).

Dari hadits tersebut diatas dapatlah diambil suatu pengertian bahwa dalam ketentuan syariat Islam anak di bawah umur yang telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan syariat Islam, maka baginya tidak dikenakan sanksi pidana yang dilakukan, kecuali jika ia mempunyai niatan untuk merugikan orang lain, maka baginya dikenakan pertanggung jawaban pidana, karena dalam syariat Islam mengatakan bahwa pertanggung jawaban pidana itu didasarkan atas dua perkara, yaitu kekuatan berfikir dan pilihan (iradah dan ikhtiar).

Seorang anak yang belum berusia 7 tahun dikembalikan kepada orang tuanya dan merekalah yang mengganti kerugian atas perbuatan anaknya tersebut. Apabila anak tersebut sudah mencapai usia 7 sampai 15 tahun, mereka tidak dikenakan sanksi pidana atas perbuatan yang telah dilakukan melainkan hanya diberi sanksi pengajaran dan juga denda yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab orang tuanya. Jika anak tersebut sudah mencapai umur 15 atau 18 tahun, maka dapat dikenakan sanksi pidana atas apa yang diperbuatnya. Jadi anak yang belum dewasa tidak dapat dikenakan sanksi pidana mengingat mereka belum dianggap cakap hukum dan belum mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Hukum pidana Islam sangat berbeda dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dalam hukum pidana di Indonesia, ketentuan mengenai anak dibawah umur diatur dalam pasal 45 yaitu jika yang dibawah umur dituntut karena melakukan tindak pidana ketika umurnya belum cukup 16 tahun, hakim dapat memerintahkan supaya anak yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya atau pemeliharanya dengan dijatuhkan sesuatu pidana. Atau memerintahkan supaya anak yang bersalah itu diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dijatuhkan pidana, yaitu jika tindak pidana itu masuk bagian kejahatan atau pelanggaran yang tersebut dalam pasal 489,

490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536, dan 540, serta tindak pidana itu di lakukannya sebelum lalu dua tahun setelah putusan yang menyalahkan dia berbuat salah satu pelanggaran atau kejahatan menjadi tetap, atau mempidanakan anak yang bersalah itu.

Namun, yang membedakan dalam hukum Islam yaitu batas usia anak dan pertanggung jawaban pidananya adalah di bawah usia 18 tahun perbuatan anak dapat dianggap melawan hukum, hanya keadaan tersebut dapat mempengaruhi pertanggung jawaban pidananya, sehingga perbuatan melanggar hukum oleh anak bisa dimaafkan atau bisa dikenakan hukuman, tetapi bukan hukuman pokok melainkan hukuman ta'zir.

Pada prinsipnya hukum Islam dalam menetapkan hukuman menekankan pada aspek pendidikan dan pencegahan. Pendidikan dimaksudkan agar seseorang yang akan melakukan kejahatan membatalkan niatnya, sedangkan yang sudah terlanjur melakukannya tidak mengulangi lagi perbuatannya walaupun dalam bentuk yang berbeda. Selain mencegah, syariat tidak lalai dalam memberikan pelajaran demi perbaikan pribadi pelakunya, sehingga apabila pelakunya tidak mengulangi lagi bukan karena takut hukuman, tetapi karena memang kesadaran diri.

C. Persepsi Hakim Mengenai Sanksi Pidana bagi Anak yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan.

Heru Sistha Aditya, SH. MH selaku hakim III, mengatakan bahwa dalam menerapkan sanksi pidana bagi anak yang melakukan kejahatan yakni adanya hukuman pokok, hukuman denda dan hukuman tambahan. Namun sebelum di hadapkan di persidangan dapat dilakukan diversi, jika diversi tidak berhasil barulah di

sidangkan. Disinilah peranan hakim dalam memutuskan sanksi apa yang tepat untuk anak, apakah di kembalikan kepada orang tua atau wali, ditempatkan di lembaga Khusus atau memang harus di penjara.¹

Sama halnya dengan bapak Amiruddin Mahmud, SH., MH selaku hakim I mengatakan bahwa untuk menerapkan sanksi pidana terhadap anak dibawah umur di upayakan tidak diberikan sanksi pidana penjara. Dalam sistem peradilan pidana anak, sebelum di sidangkan jika perkaranya adalah perkara yang ancaman pidananya 7 tahun kebawah, maka dapat dilakukan diversi. Diversi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan pelaku, penyelesaiannya di luar proses pradilan, menghindari anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab terhadap anak. Jika upaya diversi berhasil, maka tidak ada lagi lanjutan. Namun jika tidak berhasil, maka anak dihadapkan dengan hukum atau di sidang. Akan tetapi upaya diversi masih dapat dilakukan pada tahap penyidikan maupun penuntutan. Apabila sama sekali tidak dapat diupayakan diversi, maka disinilah peranan hakim untuk bagaimana memutuskan dengan semestinya sesuai dengan perkara yang dihadapi anak. Dalam memutuskan sanksi yang akan dijatuhkan kepada anak, hakim harus melihat bagaimana keadaan anak tersebut. Apakah anak tersebut memungkinkan ia dapat dididik, maka dikembalikan kepada orang tuanya. Namun jika keadaan orang tuanya tidak memungkinkan untuk mendidik anaknya, maka dapat di tempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Akan tetapi jika hakim melihat keadaan anak yang

¹Heru Sistha Aditya, *Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa*, 14 Februari 2017.

tidak dapat dididik baik oleh orang tuanya maupun di tempatkan di Lembaga dan harus di hukum, maka jalan terakhir yang dapat ditempuh adalah pidana penjara.²

Berdasarkan data di Pengadilan Negeri Sungguminasa, menurut bapak Abd. Latif, SH selaku panitera muda hukum mengatakan bahwa jumlah anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan dari tahun 2015-2016 menurun.³

Berikut beberapa data yang diperoleh dari hasil penelitian di Pengadilan Negeri Sungguminasa:

Tabel I

Jumlah kasus anak yang melakukan penganiayaan

No	Tahun	Jumlah kasus
1	2015	23 kasus
2	2016	9 kasus

Tabel II

Pasal yang dikenakan pada anak yang melakukan Penganiayaan pada tahun 2015

No	Nama	Pasal
1	Laode Sandi Bin Laode	Pasal 80 UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
2	Erwin Alias Bocil Bin Sahrir	Pasal 351 ayat 1 KUHP
3	Kahar Dg Lala Bin Mannu	Pasal 351 ayat 1 KUHP

²Amiruddin Mahmud, *Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa*, 14 Februari 2017.

³Abd. Latif, *Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa*, 16 Februari 2017.

4	Baharuddin Dg Pole	Pasal 351 ayat 1 KUHP
5	Syamsinar Dg Senga Alias Dg Ngimi	Pasal 351 ayat 1 KUHP
6	Agung Supriono Alias Mandele Bin Amir	Pasal 80 ayat 1 UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
7	Reynaldi Alias Naldi Bin Jufrianto	Pasal 80 ayat 1 UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
8	Hery Wijayanto Alias Anto Bin Tilli Dg Nai	Pasal 351 ayat 1 KUHP
9	M. Hanafi Bin Mallarungang	Pasal 351 ayat 1 KUHP
10	Arthur Fernando Rande Alias Arthur	Pasal 80 UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
11	Agus Dg Sore Bin Sapa Dg Nyalla	Pasal 351 ayat 1 KUHP
12	Arianto Bin Krisbaco Biantero Alias Anres	Pasal 351 ayat 1 KUHP
13	Rani Dg bali Bin Sonda Dg Nojeng	Pasal 351 ayat 1 KUHP
14	Abd. Rahman Bin Rahim Dg Toba	Pasal 80 ayat 1 UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
15	Abd. Azis Bin Kusi	Pasal 351 ayat 1 KUHP
16	Zainuddin Dg Kulle Bin Nongko	Pasal 351 ayat 1 KUHP
17	Iwan Dg Nai Bin Dg Gassing Dg Ngempo	Pasal 80 ayat 1 UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

		Anak
18	M. Guntur Rahmat Bin M. Ramli	Pasal 351 ayat 1 KUHP
19	M. Amir Dg Ngoya Bin Jumain	Pasal 351 ayat 1 KUHP
20	Arafah Dg Ago Bin Dg Beta	Pasal 80 ayat 1 UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
21	Idris Alias Diri	Pasal 80 ayat 2 UU RI No 35 Tahun 2014 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
22	Gapur	Pasal 80 ayat 1 UU RI No 35 Tahun 2014 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
23	A. Rasyid Hama bin Hama	Pasal 351 ayat 1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
Jumlah		23 Kasus

Tabel III

Pasal yang dikenakan pada anak yang melakukan Penganiayaan pada tahun 2016

No	Nama	Pasal
1	Haerul Nagga	Pasal 351 ayat 1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
2	Syamsul Bahri	Pasal 80 ayat 2 Jo Pasal 76 C UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

3	M. Asri Dg Sija Bin Dg Mahami	Pasal 351 ayat 1 KUHP
4	M. Ansar Dg Pagiling Bin Muh. Yakub Dg Rapi	Pasal 80 Jo Pasal 76 C UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
5	M. Asri Alias Wildan	Pasal 80 ayat 1 UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
6	Amiruddin	Pasal 351 ayat 1 KUHP
7	Ramli Bin Curung	Pasal 351 ayat 1 KUHP
8	Sudirman Alias Sudi Bin Dg Situju	Pasal 351 ayat 1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
9	ST Halijah Dg Ringgi Binti Majid	Pasal 351 ayat 1 KUHP
Jumlah		9 Kasus

Tabel IV

Putusan akhir terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan

Tahun	Putusan	Jumlah
2015	Diversi	1 kasus
	Dikirim ke LPKA	2 kasus
	Pidana Penjara	20 kasus
	Jumlah	23 kasus
2016	Diversi	-
	Dikirim ke LPKA	2 kasus
	Pidana Penjara	7 kasus

	Jumlah	9 kasus
--	--------	---------

Sebagai contoh upaya yang dilakukan pihak Pengadilan terhadap anak adalah sebagai berikut:

1. Hery Wijayanto Alias Anto Bin Tilli Dg. Nai, umur 16 tahun melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. Hakim Memutuskan menempatkan anak tersebut di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama 4 bulan.
2. Agung Supriono Alias Mandela Bin Amir bersama dengan Reynaldi Alias Naldi Bin Jufrianto, masing-masing berumur 14 tahun telah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak. Hakim menjatuhkan pidana terhadap anak tersebut berdasarkan Pasal 80 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yakni pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan.

D. Upaya Hukum Agar Anak Tidak Lagi Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur bukanlah masalah yang mudah dihadapi, diatasi ataupun juga dipecahkan, hal ini disebabkan selain sifatnya yang kompleks, juga karena tindak pidana tersebut dilakukan oleh yang masih dalam masa pertumbuhan baik jasmani maupun kepribadiannya, dimana emosinya belum stabil.

Anak-anak tersebut belum dapat berfikir secara baik dan kritis terhadap sesuatu yang sudah akan mereka perbuat, tingkah laku atau perbuatannya masih lebih

banyak bersifat emosional dari pada rasional. Perbuatan yang mereka lakukan sering tidak disertai pertimbangan akan akibat yang dapat terjadi. Oleh karena itu tindak pidana anak adalah masalah nasional yang meliputi lingkup nasional, maka upaya hukum untuk masalah tindak pidana anak ini harus dilakukan secara bersama-sama, baik dari pemerintah maupun masyarakat.

Langkah awal dalam upaya mengatasi hal tersebut di atas, dapat dilakukan dengan memberikan penjelasan secara rinci kepada anak-anak tentang beberapa aspek yuridis yang relevan dengan perbuatan-perbuatan nakal yang sering kali mereka lakukan. Dengan demikian, anak-anak akan dapat memiliki pemahaman atau pengertian, penghayatan dan perilaku hukum yang sehat. Usaha untuk mencapai tingkat kesadaran hukum di kalangan anak-anak maupun remaja dapat dilakukan melalui beberapa aktivitas, akan tetapi yang paling sederhana dengan kehidupannya yakni melalui penyuluhan hukum yang nantinya akan memberikan kesadaran bagi anak.

Selain aspek kesadaran hukum, ada aspek lain yang dapat membimbing anak untuk dapat menjadi anggota masyarakat dengan perilaku Positif. Internalisasi nilai-nilai kaidah sosial dan internalisasi nilai-nilai norma agama dapat mendidik anak memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan memiliki penghayatan serta perilaku yang sesuai dengan perintah agama, dan meninggalkan larangan agama yang dianutnya. Perspektif ini akan mampu memberi sumbangan positif bagi terwujudnya kehidupan sosial serta lingkungan yang sehat secara material maupun secara moral/spiritual.

Ditinjau dari aspek sosiologis, anak dituntut secara moral memiliki rasa solidaritas sosial yang tinggi sehingga mereka ikut memiliki kehidupan sosial dan ikut

bertanggung jawab atas keamanan, ketertiban, ketentraman, dan kedamaian dalam kelangsungan hidup kelompok sosialnya. Pencapaian kondisi sosial ini penting sekali terutama dalam rangka upaya dasar melakukan prevensi (pencegahan) dan penanggulangan terhadap kenakalan remaja. Tindakan prevensi tersebut bermanfaat besar dalam upaya meniadakan problem sosial, minimal mengurangi secara kualitatif dan kuantitatif problem sosial yang sering timbul di dalam masyarakat. Demikian pula keberadaan norma-norma agama yang dapat memberikan pembinaan dan meluruskan perkembangan mental anak remaja.

Dalam UU Perlindungan Anak menjelaskan bahwa orang yang belum cukup umur jika ia melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum (tindak pidana), maka hakim dapat menetapkan salah satu dari tiga hal yang antara lain yaitu : dengan mengembalikan kepada orang tua atau walinya tanpa dijatuhi hukuman apapun, atau diserahkan kepada pemerintah untuk di didik dengan tidak dijatuhi hukuman apapun, atau dijatuhi hukuman tetapi harus sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan anak.

Dalam pasal 20 Undang-Undang No.23 tahun 2002 menentukan: Negara, Pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-

undang perlindungan anak meletakkan kewajiban memberikan perlindungan anak berdasarkan asas-asas :

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan, dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media, massa atau lembaga pendidikan.

Dari penjelasan diatas bahwa anak yang melakukan tindak pidana, dalam pengadilan telah diputuskan untuk diserahkan kepada pemerintah, maka oleh pemerintah boleh jadi anak tersebut dimasukkan dalam rumah pendidikan Negara supaya mendapat pendidikan dari pemerintah, atau oleh pemerintah diserahkan kepada orang-orang tertentu atau diserahkan kepada suatu badan hukum, yayasan atau lembaga amal untuk menyelenggarakan pendidikannya atas tanggungan pemerintah, Baik ditempatkan dalam rumah pendidikan negeri, kemudian dengan cara lain, ia mendapatkan pendidikan dari pihak Pemerintah, baik diserahkan kepada orang-orang yang ada di Negara Republik Indonesia atau kepada perserikatan yang mempunyai hak badan hukum (*rechtspersoon*) atau balai derma yang ada di Negara Indonesia supaya disitu mendapat pendidikan, atau kemudian dengan cara lain, dari pemerintah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan mengenai sanksi pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemidanaan atau hukuman merupakan salah satu perangkat dalam hukum pidana sebagai bentuk balasan bagi pelaku tindak pidana, karena ia merupakan representasi dari perlawanan masyarakat terhadap para pelaku dan tindakan yang dilakukannya. Pemidanaan anak dibawah umur berbeda-beda sesuai dengan perbedaan masa yang dilaluinya dalam kehidupnya, menurut syariat Islam sanksi pidana didasarkan atas dua perkara, yaitu masa tidak adanya kemampuan kekuatan berfikir (*idrak*) dan masa kemampuan berfikir yang lemah pilihan (*ihthiar*).
2. Persepsi hakim terhadap sanksi pidana terhadap anak dibawah umur diupayakan tidak diberikan sanksi pidana penjara. Dalam sistem peradilan pidana anak, sebelum disidangkan jika perkaranya adalah perkara yang ancaman pidananya 7 tahun kebawah, maka dapat dilakukan diversi. Apabila tidak dapat didiversi, maka disinilah peranan hakim untuk bagaimana memutuskan dengan semestinya sesuai dengan perkara yang dihadapi anak.
3. Beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap anak dibawah umur adalah sebagai berikut:
 - a. Mengembalikan kepada orang tua, wali, orang tua asuh.

- b. Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja
- c. Menyerahkan kepada departemen sosial, atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

B. Implikasi Penelitian

Bertolak dari kesimpulan di atas maka dapat dirumuskan saran-saran yang berhubungan dengan pokok permasalahan, yaitu:

1. Hendaknya masyarakat mengetahui tujuan pembedaan (hukuman). Setelah mendapatkan hukuman, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran, sehingga pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dengan harapan mendapat ridha dari Allah SWT untuk kembali lagi kepada masyarakat dengan akhlak yang lebih baik.
2. Bagi pemerintah dan aparat penegak hukum, sebaiknya lebih memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi anak dalam memberikan sanksi pidana, agar upaya yang akan dilakukan dapat berjalan sebagaimana mestinya sehingga dapat menjadi motivasi untuk berlaku adil dan jujur dalam menegakkan hukum di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

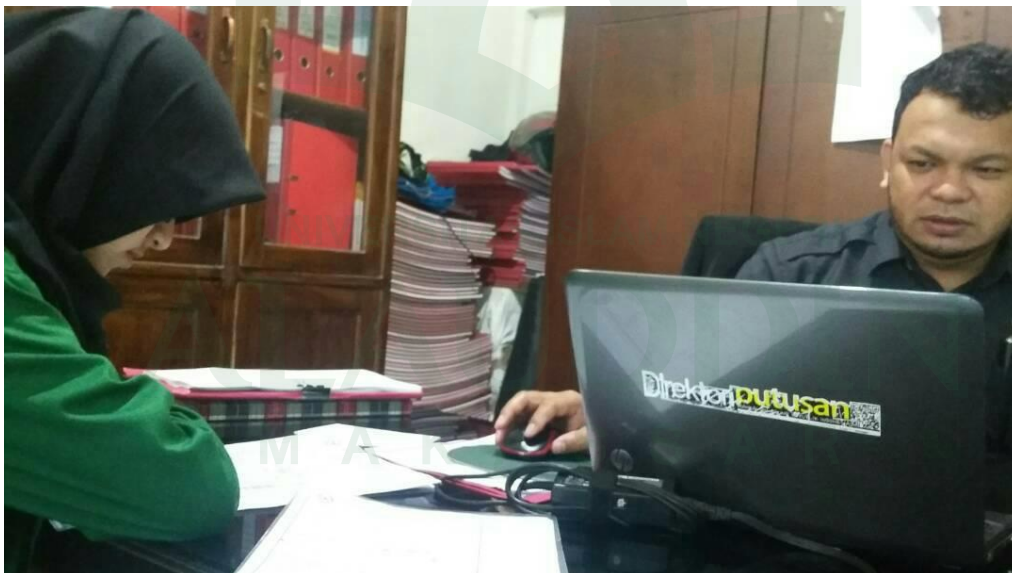
- Abdullah, Mustofa & Ruben Ahmad. *Intisari Hukum Pidana*, Cet. I; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Alam, Andi Syamsu. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Ali, Mahrus. *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012.
- Arief, Barda Nawawi. *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Chazawi, Adami. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Daniel, Moehar. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002.
- Fauzan, Achmad. *Perundang-undangan Lengkap Tentang Peradilan Umum, Peradilan Khusus, dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Prenada Media, 2015.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Hasan, Hamzah. *Hukum Pidana Islam I*, Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- Imani, Allamah Kamal Faqih. *Tafsir Nurul Quran*, Jilid 4; Al-Huda.
- Juni, Erfan Helmi. *Filsafat Hukum*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Ar-Raafi', 2012.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Lamintang, P. A. F. & Theo Lamintang. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Moleon, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.
- Poernomo, Husaini Usman. *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Prakoso, Abintoro. *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016.
- Prinst, Darwan. *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Projodikoro, Wirjono. *Asas-asas hukum Pidana di Indonesia*, Cet. III; Jakarta-Bandung: PT Eresco 1981.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai pustaka, 1994.
- Renggong, Ruslan. *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Samin, Sabri. *Pidana Islam dalam Politik Hukum Indonesia I, Eklektisme dan Pandangan Non Muslim*, Tangerang: Khalam Publishing, 2008.

- Sambas Nandang. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Sholehuddin. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Soetedjo, Wagati. *Hukum pidana Anak*, Bandung: PT Refika Aditama, 2008.
- Soetedjo, Wagati. *Hukum Pidana Anak*, Cet. I; Bandung: PT Refika Aditama, 2006.
- Soetedjo, Wagati & Melani. *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT Refika Aditama, 2013.
- Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. *Pedoman Penulisan karya Tulis Ilmiah: Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi dan laporan Penelitian*, Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- UU Peradilan Anak, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Weerjo, Sastro. *Pendidikan Kewarganegaraan*, Bandung: Pribumi Mekar, 2007.
- Wiyono, R. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.



LAMPIRAN-LAMPIRAN





Amiruddin Mahmud, S.H., M.H.
 Catatan
 Apakah yg mengatur tentang peran pengadilan dalam menerapkan sanksi sdh relevan?
 → Ya
 Apa faktor penyebab melakukan tindak pidana?
 → faktor internal: kurang perhatian ortu
 " external: lingkungan
 upaya yg dilakukan
 → yg pasti di upayakan tidak diberikan hukuman pidana penjara, tp jika jalan terakhir:
 1. di kembalikan ke ortu/wali
 2. di tempatkan di lembaga pembinaan
 3. di pidana
 dari ke 3 upaya di atas faktor sudah di tetapkan bahwa anak akan di pidana, belia bisa dapat melalui upaya diversi (perdamaian)

CATATAN
 data awal yg melatikan Page
 6 2015 → 29 kasus
 berakhir diversi = 1
 diburu kelumbaga = 2
 di pidana penjara 20
 2016 → 9 kasus
 diversi = -
 diburu kelumbaga = 2
 penjara = 7
 pasal yg dikenakan:
 A 351 ayat 1 KUHP
 B 80 ayat 1 UU No. 35 thn 20
 C 30 55 ayat (1) ke 1 KUHP

19
 PEDOMAN WAWANCARA
 Penelitian berkualitas lahir dari proses penelitian yang tepat dan cermat baik berupa instrument penelitian maupun pengumpulan data dengan memperoleh data teruji validitas dan reliabilitasnya, maka perlu disusun pedoman wawancara dalam penelitian ini untuk memperoleh data. Adapun pedoman wawancara sebagai berikut:
 1. Menurut bapak/ibu, apakah aturan yang mengatur tentang kedudukan dan peran kejaksaan sudah relevan saat ini? *ya, sudah relevan*
 2. Bagaimanakah kedudukan dan peran kejaksaan dalam memberikan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan?
 3. Bagaimanakah eksistensi kejaksaan negeri gowa dalam melakukan penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan?
 4. Menurut bapak/ibu, apa yang menjadi faktor penyebab sehingga anak melakukan tindak pidana penganiayaan? *kurang perhatian ortu, lingkungan sekitar*
 5. Upaya apa yang dilakukan untuk memberikan efek jera terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan? *pidana penjara, denda, pembinaan*
 6. Dari tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak, bagaimanakah penerapan sanksi pidana yang dilakukan oleh kejaksaan?
 7. Sejauh yang bapak/ibu ketahui dari sanksi pidana yang diberikan kepada anak dibawah umur yang melakukan penganiayaan, apakah menimbulkan efek jera? *tidak, karena anak itu sendiri, bagaimana mereka menghadapi lingkungan sekitar*
 8. Menurut bapak/ibu upaya apa yang dapat dilakukan kejaksaan agar anak tidak lagi melakukan tindak pidana penganiayaan?
 Kembalikan ke ortu, di tempatkan di lembaga di pidana, dan pembinaan

PUTUSAN
 NO. 23 / PID.SUS.ANAK / 2015 / PN SGM
 DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
 Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana Anak pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Anak:

Nama lengkap	HERY WIJAYANTO Alias ANTO Biri TILLI Dg. NAI
Tempat lahir	PAKU, Kab. GOWA
Umur / Tanggal lahir	16 Tahun / 01 MARET 1999
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI
Kebangsaan	INDONESIA
Tempat Tinggal	Dusun Paku, RT/RW : 001/001, Desa Julubori, Kec. Palianga, Kab. Gowa
Agama	ISLAM
Pekerjaan	PELAJAR

 Anak tersebut ditahan oleh:
 - Penyidik tidak dilakukan penahanan;
 - Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan;
 - Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa tidak dilakukan penahanan;
 Anak tidak dilakukan penahanan tersebut di persidangan telah didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Nur Haeniaty K. S.H Advokad / Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan K. H. Wahid Hasyim No. 44 C, Sungguminasa, Kabupaten Gowa berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum bagi Anak tersebut, telah pula didampingi oleh Jaelani, S.H Pembimbing Kemasyarakatan pada Bala Pemasyarakatan Kelas I Makassar (BAPAS), serta di dampingi orang tua dari Anak tersebut;
 Pengadilan Negeri tersebut
 Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ini,
 Setelah membaca berita acara diversi,
 Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak di persidangan,
 Hal. 1 Perkara Pidana No. 23/Pid.Sus.Anak.2015/PN

2. Menempatkan Anak **Heri Wijayanto Alias Anto Bin Tili Dg. Nai**, oleh karena itu Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani oleh Anak **Heri Wijayanto Alias Anto Bin Tili Dg. Nai**, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang memutuskan lain disebabkan karena Anak tersebut melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan Orangtua Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2015 oleh **MOHAMAD SHOLEH, S.H., M.H** sebagai Hakim Anak. Putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 07 Desember 2015 dalam persidangan yang tertutup untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **IRSAN FAHDIN ISFANY, S.E., S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan dihadiri **HERLINA, S.H** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa dengan dihadiri Anak tersebut dan didampingi Penasihat Hukumnya serta Petugas Bapas Makassar dan orang tua Anak.

CATATAN

2015 → 9 kasus ✓
2015 → 23 kasus

Amiruddin
351 ayat 1 KUHP 2016
Pengantar 3 bulan

Ramli bin Curung 2016
351 ayat 1 KUHP
Pengantar 5 bulan

Sudirman alias Indri bin Dg. Sihya
2016 8 bulan pengantar
351 (1) jo 55 KUHP

St. Haliyah Dg. Ringgi Biale Majid
351 ayat 1 2016
Pengantar 2 bulan

CATATAN

M. Asri
351 ayat 1 KUHP
2016 / Pid. B / 2016 / PM
Pengantar 1 Bln 15 hari

5. N. Asri Dg. Pongling bin M. Yacob
Dg. Kari
Pengantar 4 bulan
- Put. No. 101 / Ri. No. 35 / 2016 / PM
Pengantar 2 Bln 23 Hri
- Put. No. 35 / 2016 / PM
Pengantar 2 Bln 23 Hri
- Put. No. 35 / 2016 / PM
Pengantar 2 Bln 23 Hri
- Put. No. 35 / 2016 / PM
Pengantar 2 Bln 23 Hri

6. M. Asri alias Widad
Pengantar 6 bulan
Put. No. 35 / 2016 / PM

12/10/16
10
100 1000

FORMAT PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

Hal : Permohonan Judul Skripsi

Kepada Yth,

Ketua Jurusan/Program Studi

Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Di

Samata-Gowa

Assalamu Alaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fira Yuniar

NIM : 10300113170

Semester/Klpk: VII/Hpk D

Angkatan : 2013

Dengan ini mengajukan permohonan judul skripsi sebagai berikut :

1. "Tinjauan yuridis tentang peran kejaksaan terhadap system penerapan sanksi pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan (Studi kasus perkara di Kejaksaan Negeri Gowa)" *berspekulatif hukum Islam*.
- X "Pertimbangan hukum hakim dalam memberikan putusan tentang tindak pidana penganiayaan yang dilakukan bersama (Studi kasus perkara No. 144/Pid.B/2016/PN Sungguminasa)"
- X "Tinjauan yuridis terhadap peran kejaksaan dalam menyelesaikan perkara tindak pidana pemerasan disertai ancaman (studi kasus di Kejaksaan Negeri Gowa)" *studi sdrh adu*.
- X "Tinjauan yuridis terhadap kekuatan pembuktian keterangan saksi verbalisant dalam proses persidangan (Studi kasus di Kejaksaan Negeri Gowa)"

Demikian permohonan ini saya ajukan, atas perhatian dan persetujuannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.Wb

September 2016

Mengetahui,

Pemohon

Penasehat Akademik



(Dr. Alimuddin M. Ag)



(Fira Yuniar)

PENGESAHAN DRAFT SKRIPSI

Nomor: /HPK/2017

Judul Skripsi: Sanksi Pidana bagi Anak yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan dalam
Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sungguminasa)

Gowa, 20 Januari 2017

Penyusun,



Fira Yuniar
Nim. 10300113170

Pembimbing I



Prof. Dr. Usman, MA
Nip. 195809901 199102 1 001

Pembimbing II



Dr. Hj. Rahmatiah HL., M. Pd
Nip. 19690606 199403 2 003

Diketahui Oleh:

Ketua Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan



Dra. Nila Sastrawati, M. Si
Nip. 19710712 199703 2 002

Disahkan Oleh:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Alauddin Makassar



Prof. Dr. Darussalam, M. Ag
Nip. 19621016 1990031 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus I Jl. Slt Alauddin Makassar Tlp. (0411) 864924 Fax 864923

Kampus II Jl. HM. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa- Gowa Tlp. (0411) 424835 Fax 424836

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

Nomor : 687 Tahun 2016

T E N T A N G

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING DRAFT/ SKRIPSI
TAHUN 2016

- Menimbang** :
- a. Bahwa penulisan karya ilmiah (skripsi) merupakan salah satu persyaratan pada jenjang Strata Satu (S1) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, untuk itu dipandang perlu menetapkan **Dosen Pembimbing**;
 - b. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dan disertai tugas sebagai **Dosen Pembimbing Draft/Skripsi**.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
 4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 jo No. 202 B Tahun 1998, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang menandatangani Surat Keputusan;
 5. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
 6. Keputusan Rektor Nomor 129 C tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- a. Menunjuk saudara : 1. Prof. Dr. Usman, MA
2. Dr. Hj. Rahmatiah HL., M. Pd
Sebagai pembimbing mahasiswa :
Nama : Fira Yuniar
NIM : 10300113170
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ HPK
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis tentang Peran Kejaksan terhadap Sistem Penerapan Sanksi Pidana Bagi Anak yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Perkara di Kejaksan Negeri Gowa)
 - b. Melaksanakan pembimbing skripsi sampai mahasiswa tersebut selesai karya tulis ilmiah dengan baik;
 - c. Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya **Surat Keputusan** ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2016;
 - d. Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Ditetapkan di Samata
Pada tanggal : 5 Desember 2016
Dekan

Prof. Dr. DARUSSALAM, M. Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

Tembusan :

- Yth 1. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata – Gowa;
2. Para Dekan dalam lingkup UIN Alauddin Makassar di Makassar



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus I Jl. Slt. Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864924 Fax 864923
Kampus II Jl. Slt. Alauddin No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa Tlp. 424835 Fax. 424836

Nomor : SI.1/PP.00.9/330/2017

Samata, 27 Januari 2017

Sifat : Penting

Lamp : -

Hal : **PERMOHONAN IZIN PENELITIAN/WAWANCARA**

Kepada

Yth. Kepala Pengadilan Negeri Sungguminasa

Di

Sungguminasa

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa Mahasiswa UTN Alauddin Makassar yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Fira Yuniar
Nim	: 10300113170
Fakultas/jurusan	: Syariah Dan Hukum / HPK
Semester	: VII (Tujuh)
Alamat	: Jl. Mustafa Dg. Bunga Kec. Somba Opu Kab. Gowa

Bermaksud melakukan penelitian dan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsinya :

SANKSI PIDANA BAGI ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sungguminasa)

Dengan Dosen Pembimbing : 1. Prof. Dr. Usman, MA
2. Dr. Hj. Rahmatiah HL., M. Pd

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Sungguminasa.

terhitung mulai tanggal 1 Februari 2017 s/d 1 Maret 2017.

Demikian harapan kami, atas bantuan bapak di ucapkan terima kasih.

Wassalam

Samata 27 Januari 2017

An Rektor

Dekan Fakultas Syariah & Hukum



Prof. Dr. Darussalam, M. Ag
NIP. 19621016 199003 1 003



PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA

JALAN USMAN SALENGKE NO. 103 TELP. (0411) 861129-861089
SUNGGUMINASA – KABUPATEN GOWA 92111

SURAT KETERANGAN

Nomor : W22.U3 / 023 / HK / II / 2017

Yang bertanda tangan di bawah ini, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, menerangkan bahwa :

N a m a : Fira Yuniar
Nomor Induk Mahasiswa : 10300113170
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/HPK
Jenis kelamin : Perempuan
Fakultas/Universitas : Fakultas Syari'ah dan Hukum / Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
A l a m a t : Jl. Mustafa Dg. Bunga, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa.

Telah melakukan Penelitian pada Kantor Pengadilan Negeri Sungguminasa, dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul “ **Saksi Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Perspektif Hukum Islam** ” (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sungguminasa “.

Demikian surat ini dibuat dan diberikan kepada Peneliti tersebut diatas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungguminasa, 16 Februari 2017.

PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA
PANITERA MUDA HUKUM



Abd. Latif, S.H.

NIP. 19650920 199003 1 002

Tembusan :

- Arsip



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No. 63 Tlo (0411) 864928-864930 Fax. 864923
Kampus III : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa - Gowa Telp. 841879 Fax 8221400

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Nomor : 57/Tahun 2017
TENTANG
PANITIA DAN PENGUJI UJIAN SEMINAR HASIL/SKRIPSI
TAHUN 2017

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** : Surat Permohonan :
Nama : Fira Yuniar
N I M : 10300113170
Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaran
Hari/Tanggal : Kamis, 8 Juni 2017
Prihal : Ujian Seminar Hasil/Skripsi
Judul : "Sanksi Pidana Bagi Anak yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sungguminasa)"
- Menimbang** : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Seminar Hasil/Skripsi;
b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;
c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 289 Tahun 1993 dan Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 Juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Seminar Hasil/Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :
- Ketua : Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
Sekretaris : Dra. Nila Sastrawati, M.Si.
Penguji I : Dr. Dudung Abdullah, M.Ag.
Penguji : Dr. Rahma Amir, M.Ag.
Pelaksana : 1. Mujahidah, SE
 2. Nurhayati Wahid
- Kedua** : Panitia bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Seminar Hasil/Skripsi
Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2017;
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diketapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata
Pada tanggal : 30 Mei 2017
Dekan
Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Nomor : 078 Tahun 2017
TENTANG
PANITIA, PENGUJI DAN PESERTA UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI (KOMPREHENSIF)
TAHUN 2017

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** : Surat permohonan mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Tingkat Akhir Jurusan/Program Studi H P K tanggal 12 Juli 2017 perihal Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif.
- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif, maka dipandang perlu menetapkan Panitia, Penguji dan Peserta Ujian;
b. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dan disertai tugas sebagai Panitia, Penguji dan Peserta Ujian.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI. Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar;
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bebas Anggaran dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 20 tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar.
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 Juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar.
8. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG PANITIA, PENGUJI DAN PESERTA UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI/KOMPREHENSIF**
- Pertama** : Menetapkan **Panitia, Penguji dan Peserta** Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;
Kedua : **Tugas Panitia** mempersiapkan segala instrumen yang berkaitan dengan Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;
Ketiga : **Tugas Penguji** melaksanakan Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;
Keempat : **Tugas Panitia dan Penguji** dianggap selesai setelah berakhirnya Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;
Kelima : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya **Surat Keputusan** ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2017;
Keenam : **Surat Keputusan** ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SURAT KEPUTUSAN ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Disahkan di : Samata
: 12 Juli 2017

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

Tembusan :
Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata - Gowa



Kampar III : Jalisa Sultan Alauddin No. 63 Tlp. (0411) 864928-864930 Fax. 864923
Kampar III : M. H. M.Yasin Limpo No. 36 Sasiata Sungguminasa – Gowa Telp. 841879 Fax 8221400

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Nomor 360 Tahun 2017
TENTANG
PANITIA DAN PENGUJI UJIAN MUNAQASYAH/SKRIPSI
TAHUN 2017

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

Membaca : Surat Permohonan :
 Nama : Fira Yuniar
 N I M: : 10300113170
 Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
 Hari/Tanggal : Kamis, 27 Juli 2017
 Prihal : Ujian Munaqasyah/Skripsi
 Judul : “Sanksi Pidana Anak yang Melakukan Tindak Pidana
 Penganiayaan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di
 Pengadilan Negeri Sunguminasa)”

Menimbang : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Munaqasyah/Skripsi;
b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;
c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 25 Tahun 2013 Juncto Peraturan Menteri Agama RI No. 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Munaqasyah/Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :

Ketua : Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
Sekretaris : Dra. Nila Sastrawati, M.Si
Penguji I : Dr. Dudung Abdullah, M.Ag
Penguji II : Dr. Rahma Amir, M.Ag
Pelaksana : 1. Mujahidah, SE
2. Nurhayati Wahid

Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2017;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.


 Ditetapkan di : Samata
 Pada tanggal : 21 Juli 2017
 Dekan,

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Fira Yuniar, lahir di Tibona Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba pada tanggal 13 Mei 1995 dari pasangan suami istri **Ambo** dan **Ida** yang merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Penulis memulai pendidikannya pada tingkat sekolah dasar di SD Negeri 68 Tibona pada tahun 2001 dan tamat pada tahun 2007. Kemudian melanjutkan pendidikan di MTS Negeri 410 Tanete pada tahun 2007 dan selesai pada tahun 2010. Adapun pengalaman organisasi yaitu pernah menjadi pengurus OSIS. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 2 Bulukumba pada tahun 2010 dan tamat pada tahun 2013. Adapun pengalaman organisasi yaitu menjadi pengurus MPK (Majelis Permusyawaratan Kelas) dan pengurus PMR (Palang Merah Remaja). Kemudian melanjutkan pendidikan di tingkat universitas di UIN Alauddin Makassar, jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Fakultas Syari'ah dan Hukum. Pernah menjadi pengurus HMJ periode 2014-2015 dan anggota IPPS periode 2014-2015. Adapun prestasi yang pernah di raih, yaitu :

Tingkat SD pada tahun 2004 : Juara I Lomba MTQ tingkat Dusun. Kemudian tahun 2006 : Juara I Lomba MTQ tingkat Desa. Tahun 2009 : Juara II Lomba MTQ Tingkat Kecamatan. Tingkat SMP pada tahun 2009 : Juara II Lomba BTQ. Sedangkan tingkat SMA pada tahun 2012 : Juara II Lomba Syahrir Qur'an. Di tingkat Universitas Tahun 2014 : juara I lomba Peradilan Semu Piala Dekan Fakultas syari'ah dan Hukum.